



UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MODUL AJAR · BERBASIS OUTCOME-BASED EDUCATION

Teori dan Praktek Politik Lokal

Kode 3PBIP223 · 3 sks · Semester 6
Kurikulum 2023

Penyusun

Purwanto, S.IP., M.Si.

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik · Universitas Ichsan Gorontalo · 2023

IDENTITAS MODUL

Judul Modul	Modul Ajar Teori dan Praktek Politik Lokal
Mata Kuliah	Teori dan Praktek Politik Lokal
Kode Mata Kuliah	3PBIP223
Rumpun Mata Kuliah	MKPP
Bobot	3 sks (Teori = 3, Praktik = 0)
Semester	6 (enam)
Mata Kuliah Prasyarat	Tidak ada
Program Studi	Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi	Universitas Ichsan Gorontalo
Kurikulum	Kurikulum 2023 berbasis Outcome-Based Education (OBE)
Dokumen Acuan	RPS-3PBIP223 Teori dan Praktek Politik Lokal
Penyusun	Purwanto, S.IP., M.Si. (NIDN 0926096601)
Penelaah	
Versi / Tahun	1.0 / 2023

Hak Penggunaan

Modul ini merupakan bahan ajar internal Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Ichsan Gorontalo. Penggunaan untuk kepentingan perkuliahan diperkenankan dengan tetap mencantumkan sumber.

LEMBAR PENGESAHAN

Modul Ajar **Teori dan Praktek Politik Lokal** (3PBIP223) telah ditelaah dan disahkan sebagai bahan ajar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo.

Disusun oleh, Penyusun

Ditelaah oleh, Koordinator RMK

Purwanto, S.IP., M.Si.

NIDN. 0926096601

.....

NIDN.

Disetujui oleh, Ketua Program Studi

Mengetahui, Dekan FISIP

.....

NIDN.

.....

NIDN.

Gorontalo, ... 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Modul Ajar **Teori dan Praktek Politik Lokal** ini dapat diselesaikan. Modul ini disusun sebagai bahan belajar utama bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo pada semester enam. Modul merupakan penjabaran operasional dari Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah berkode 3PBIP223 dalam Kurikulum 2023 yang dikembangkan dengan pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE).

Sejak desentralisasi dan otonomi daerah diberlakukan pascareformasi, daerah tumbuh menjadi arena kekuasaan yang dinamis: di sana kepala daerah, DPRD, partai politik, pengusaha, tokoh adat, birokrasi, dan masyarakat sipil saling berebut pengaruh atas kebijakan publik. Modul ini menempatkan Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia sebagai laboratorium analisis, sehingga mahasiswa tidak berhenti pada pemahaman teori, tetapi juga mampu membaca peta aktor dan relasi kuasa secara empiris, lalu merumuskan advokasi kebijakan yang berbasis bukti, akuntabel, dan beretika.

Setiap unit dalam modul ini diturunkan dari satu Sub-CPMK dan dilengkapi dengan pemantik, uraian materi, studi kasus, aktivitas pembelajaran, latihan, serta umpan balik untuk mengukur tingkat penguasaan secara mandiri. Seluruh unit terhubung dalam satu proyek semester yang berujung pada policy brief dan simulasi forum advokasi publik. Nilai dasar ICHSA-N Universitas Ichsan Gorontalo, yaitu *Integrity, Creativity, Harmony, Service, Adaptability*, dan *Nationalism*, diintegrasikan ke dalam aktivitas dan penilaian.

Penyusun menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Fakultas dan Program Studi, rekan dosen, serta semua pihak yang telah memberi masukan. Modul ini tentu masih memiliki kekurangan; kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya.

Gorontalo, 2023
Penyusun,

Purwanto, S.IP., M.Si.

DAFTAR ISI

Identitas Modul	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Petunjuk Penggunaan Modul	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Deskripsi Singkat Mata Kuliah	1
1.2 Relevansi dan Posisi Mata Kuliah	1
1.3 Capaian Pembelajaran	2
1.4 Matriks Keterkaitan dan Peta Unit Modul	3
1.5 Peta Alur Belajar	5
1.6 Strategi Pembelajaran dan Proyek Semester	5
1.7 Sistem Penilaian	7
1.8 Ketuntasan Belajar dan Tindak Lanjut	8
BAB II Politik Lokal, Desentralisasi, dan Otonomi Daerah	9
BAB III Teori dan Model Analisis Politik Lokal	17
BAB IV Relasi Kekuasaan, Patronase, dan Konflik Elite.....	24
BAB V Laporan Analisis Aktor-Arena	32
BAB VI Isu Politik Lokal dan Problem Statement Berbasis Bukti	38
BAB VII Strategi Advokasi dan Komunikasi Kebijakan	45
BAB VIII Policy Brief yang Akuntabel dan Beretika	52
BAB IX Presentasi Kolaboratif dan Refleksi Integritas	59
BAB X ASESMEN SUMATIF DAN INTEGRASI PENILAIAN.....	65
10.1 Prinsip Asesmen	65
10.2 Peta Komponen Penilaian dan Sub-CPMK.....	65
10.3 Kisi-Kisi dan Contoh Naskah UTS.....	66
10.4 Kisi-Kisi dan Contoh Naskah UAS	68
10.5 Rubrik Penilaian Tugas	69
10.6 Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan.....	71
Glosarium.....	72
Daftar Pustaka	74
Lampiran	75
Lampiran 1 Templat Lembar Kerja Peta Aktor.....	75
Lampiran 2 Templat Problem Statement Advokasi	76
Lampiran 3 Kanvas Strategi Advokasi	77
Lampiran 4 Templat Policy Brief	78
Lampiran 5 Lembar Pernyataan Penggunaan GenAI dan Orisinalitas.....	79
Lampiran 6 Kuesioner Umpan Balik Mahasiswa terhadap Modul	80

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Modul ini dirancang untuk dipelajari secara bertahap, satu unit untuk setiap Sub-CPMK. Ikuti petunjuk berikut agar proses belajar terarah pada capaian pembelajaran yang ditetapkan.

A. Petunjuk bagi Mahasiswa

1. Pelajari **Bab I** terlebih dahulu untuk memahami capaian pembelajaran, peta alur belajar, proyek semester, dan sistem penilaian mata kuliah.
2. Pelajari unit secara berurutan sesuai peta alur belajar. Setiap unit dibangun di atas unit sebelumnya dan menyumbang satu luaran bagi proyek semester.
3. Di awal setiap unit, baca rumusan **Sub-CPMK** dan **indikator capaian** agar Anda mengetahui kemampuan yang harus dikuasai dan bukti yang akan dinilai.
4. Tanggapi **pemantik** sebelum membaca uraian materi. Tuliskan jawaban awal Anda, lalu bandingkan dengan pemahaman setelah mempelajari materi.
5. Kerjakan **aktivitas pembelajaran** sesuai petunjuk, baik yang dilaksanakan di kelas (luring) maupun melalui LMS (daring).
6. Kerjakan **latihan** secara jujur tanpa melihat kunci jawaban, lalu cocokkan dan hitung tingkat penguasaan Anda (lihat Subbab 1.8).
7. Lanjutkan ke unit berikutnya apabila tingkat penguasaan mencapai **70% atau lebih**. Apabila belum, pelajari kembali bagian yang belum dikuasai dan kerjakan tugas remedial.
8. Isi **refleksi diri** di akhir setiap unit. Kumpulan refleksi menjadi bahan jurnal refleksi pada Unit 8.

B. Petunjuk bagi Dosen Pengampu

1. Gunakan modul ini bersama RPS-3PBIP223 sebagai acuan pelaksanaan perkuliahan setiap minggu.
2. Sampaikan Sub-CPMK, indikator, dan kriteria penilaian kepada mahasiswa di awal setiap unit agar asesmen berlangsung transparan.
3. Fasilitasi aktivitas berbasis kasus (*Case-Based Learning*) dan proyek (*Project-Based Learning*); peran dosen adalah fasilitator, pemberi umpan balik, dan penjamin mutu luaran.
4. Gunakan rubrik pada unit terkait dan Bab X untuk menilai tugas, laporan, policy brief, dan presentasi secara konsisten.
5. Catat nilai per Sub-CPMK sebagai dasar pengukuran ketercapaian CPMK dan CPL di SI-OBE, lalu gunakan hasilnya untuk perbaikan pembelajaran berkelanjutan.

C. Etika Akademik dan Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Generatif (GenAI)

Mahasiswa wajib menjunjung kejujuran akademik (nilai *Integrity*). Seluruh karya yang dikumpulkan harus merupakan hasil kerja sendiri atau kelompok, dengan sumber yang dikutip secara benar. GenAI boleh dimanfaatkan secara terbatas dan bertanggung jawab dengan ketentuan berikut.

- **Diperbolehkan:** menggali gagasan awal, meminta penjelasan konsep, memeriksa tata bahasa, dan menyusun kerangka tulisan.

- **Dilarang:** meminta GenAI menulis seluruh tugas, mengarang data atau kutipan, serta menyajikan keluaran GenAI sebagai karya sendiri tanpa pengungkapan.
- **Wajib:** memverifikasi setiap fakta, data, dan rujukan yang dihasilkan GenAI terhadap sumber aslinya.
- **Wajib:** mencantumkan pernyataan penggunaan GenAI pada setiap tugas tertulis, memuat alat yang dipakai, tujuan penggunaan, dan bagian yang dibantu.

D. Penanda dalam Modul

Modul ini menggunakan kotak berwarna untuk membedakan fungsi setiap bagian. Kenali penanda berikut agar Anda mudah menavigasi isi modul.

Sub-CPMK & Indikator	Kemampuan akhir yang dituju unit dan bukti capaiannya.
Pemantik	Pertanyaan atau fenomena pembuka untuk mengaktifkan pengetahuan awal.
Studi Kasus	Kasus empiris politik lokal di Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia.
Aktivitas	Langkah kerja individu atau kelompok, di kelas maupun melalui LMS.
Latihan & Umpan Balik	Soal atau tugas formatif beserta kunci jawaban atau rubrik.
Refleksi	Pertanyaan untuk merenungkan proses dan capaian belajar.
Nilai ICHSA-N	Penguatan nilai dasar Universitas Ichsan Gorontalo dalam aktivitas.

BAB I

PENDAHULUAN

Orientasi mata kuliah, capaian pembelajaran, alur belajar, dan sistem penilaian

1.1 Deskripsi Singkat Mata Kuliah

Mata kuliah **Teori dan Praktek Politik Lokal** (3 sks) mengkaji konsep desentralisasi, otonomi daerah, peta aktor, arena kekuasaan, serta dinamika relasi kekuasaan dan kebijakan di tingkat pemerintahan daerah. Kajian ditekankan pada konteks empiris Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebagai laboratorium analisis.

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian yang membentuk alur belajar progresif dari konsep menuju praktik: landasan teoretis (CPMK-1), analisis berbasis data (CPMK-2), perancangan strategi advokasi berbasis bukti dengan dukungan teknologi informasi dan platform SPBE (CPMK-3), hingga penyajian rekomendasi kebijakan dalam format *policy brief* yang akuntabel (CPMK-4). Pembelajaran menggunakan pendekatan *Case-Based Learning* dan *Project-Based Learning* sesuai SN-Dikti dan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2024, sehingga mahasiswa menganalisis kasus politik lokal secara kolaboratif dan menghasilkan luaran nyata berupa laporan analisis aktor-arena dan *policy brief*.

1.2 Relevansi dan Posisi Mata Kuliah

Mata kuliah ini diselenggarakan pada semester enam, ketika mahasiswa telah memiliki bekal dasar ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Tidak ada mata kuliah prasyarat formal, tetapi pemahaman tentang sistem pemerintahan Indonesia dan hubungan pusat-daerah akan sangat membantu. Kemampuan yang dibangun relevan bagi lulusan yang akan berkiprah sebagai analis kebijakan dan perencana pemerintahan, aparatur pemerintah daerah, tenaga ahli lembaga legislatif, penyelenggara dan pengawas pemilu, konsultan politik, maupun fasilitator pemberdayaan masyarakat.

Bagi mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo, politik lokal bukan pokok bahasan yang jauh: dinamika pilkada, relasi eksekutif-legislatif daerah, jaringan patronase, dan perebutan sumber daya berlangsung di sekitar mereka sendiri. Karena itu, seluruh aktivitas dalam modul memanfaatkan kasus dari kabupaten/kota di Sulawesi dan KTI, termasuk Provinsi Gorontalo, sebagai bahan analisis.

Tabel 1.1 Integrasi nilai ICHSA-N dalam mata kuliah

Nilai	Wujud dalam pembelajaran
Integrity	Kejujuran dalam pengumpulan dan penyajian data, penolakan plagiasi, serta komitmen antikorupsi dalam rekomendasi kebijakan.
Creativity	Merancang strategi advokasi dan media komunikasi kebijakan yang inovatif dan kontekstual.
Harmony	Menghargai perspektif kelompok lain dalam diskusi, debat teori, dan <i>gallery walk</i> .

Nilai	Wujud dalam pembelajaran
Service	Mengarahkan rekomendasi kebijakan pada kepentingan dan pemberdayaan masyarakat daerah.
Adaptability	Merevisi argumen dan produk berdasarkan umpan balik dosen dan sejawat.
Nationalism	Menempatkan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nilai kebangsaan.

1.3 Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran mata kuliah disusun secara berjenjang: Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi yang dibebankan pada mata kuliah dijabarkan menjadi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), lalu dirinci menjadi Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir pada setiap tahap belajar. Setiap Sub-CPMK menjadi dasar satu unit dalam modul ini.

1.3.1 CPL Program Studi yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Tabel 1.2 CPL yang dibebankan

Kode	Rumusan CPL
CPL-01	Menunjukkan sikap religius, berintegritas, menjunjung Pancasila dan nilai kebangsaan, menaati etika pemerintahan dan prinsip antikorupsi, serta bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri maupun dalam tim.
CPL-05	Mampu menerapkan fungsi manajemen pemerintahan — tata kelola sumber daya manusia, keuangan, organisasi, pelayanan publik, strategi, dan pengambilan keputusan — secara akuntabel.
CPL-07	Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan data untuk mendukung tata kelola pemerintahan digital (SPBE) dan mewujudkan <i>agile governance</i> .
CPL-09	Mampu berkomunikasi secara efektif, memimpin dan bekerja dalam tim lintas disiplin, memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, serta melakukan pembelajaran sepanjang hayat.

1.3.2 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Tabel 1.3 Rumusan CPMK

Kode	Rumusan CPMK
CPMK-1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, teori, dan kerangka analisis politik lokal (desentralisasi, otonomi daerah, aktor politik, arena kekuasaan) beserta dinamikanya dalam konteks pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia, dengan menjunjung nilai integritas dan kebangsaan sebagai landasan sikap kritis.
CPMK-2	Mahasiswa mampu menganalisis pola relasi kekuasaan, peta aktor, dan dinamika politik lokal — termasuk praktik patronase, koalisi, dan konflik elite — melalui studi kasus empiris pemerintahan daerah di wilayah Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia, menghasilkan laporan analisis aktor-arena yang terstruktur dan berbasis data.
CPMK-3	Mahasiswa mampu merancang strategi advokasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat berbasis bukti sebagai respons atas isu politik lokal yang teridentifikasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan platform data tata kelola (SPBE/data terbuka) untuk memperkuat argumentasi, serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pemangku kepentingan lintas disiplin.

Kode	Rumusan CPMK
CPMK-4	Mahasiswa mampu menyajikan hasil kajian politik lokal secara kolaboratif dalam bentuk presentasi dan laporan kebijakan (<i>policy brief</i>) yang akuntabel dan beretika, menampilkan sikap bertanggung jawab atas peran dalam tim lintas disiplin, serta merefleksikan komitmen antikorupsi dan nilai-nilai kebangsaan dalam rekomendasi yang dihasilkan.

1.3.3 Kemampuan Akhir Tiap Tahap Belajar (Sub-CPMK)

Tabel 1.4 Rumusan Sub-CPMK

Kode	Rumusan Sub-CPMK	CPMK	Minggu
Sub-CPMK1	Menjelaskan konsep dasar politik lokal, kerangka desentralisasi, dan otonomi daerah serta mengidentifikasi aktor-aktor utama dalam arena kekuasaan pemerintahan daerah di Indonesia.	CPMK-1	1–2
Sub-CPMK2	Membandingkan kerangka teori dan model analisis politik lokal (pluralisme, elitisme, neo-institusionalisme, dan pendekatan patron-klien) serta menerapkannya untuk membaca dinamika pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia.	CPMK-1	3–4
Sub-CPMK3	Menganalisis pola relasi kekuasaan dan peta aktor politik lokal — mencakup koalisi, patronase, dan konflik elite — berdasarkan data empiris dari satu kabupaten/kota di wilayah Sulawesi.	CPMK-2	5–6
Sub-CPMK4	Menyusun laporan analisis aktor-arena yang terstruktur dan berbasis data atas satu kasus empiris politik lokal di Kawasan Timur Indonesia sebagai kulminasi kajian pra-UTS.	CPMK-2	7
Sub-CPMK5	Mengidentifikasi isu politik lokal yang urgen dan merumuskan <i>problem statement</i> advokasi kebijakan berbasis bukti dengan memanfaatkan data terbuka dan platform SPBE yang tersedia.	CPMK-3	9–10
Sub-CPMK6	Merancang strategi advokasi kebijakan yang komprehensif dan mengomunikasikannya secara efektif kepada pemangku kepentingan lintas disiplin melalui simulasi presentasi advokasi.	CPMK-3	11–12
Sub-CPMK7	Menyusun <i>policy brief</i> yang akuntabel dan beretika atas isu politik lokal yang dikaji, mencerminkan komitmen antikorupsi dan nilai-nilai kebangsaan dalam rekomendasi yang dihasilkan secara kolaboratif.	CPMK-4	13–14
Sub-CPMK8	Mempresentasikan hasil kajian politik lokal secara kolaboratif dan merefleksikan pembelajaran serta komitmen integritas diri dalam peran tim lintas disiplin melalui presentasi final dan jurnal refleksi.	CPMK-4	15

1.4 Matriks Keterkaitan dan Peta Unit Modul

Matriks berikut menunjukkan keselarasan konstruktif (*constructive alignment*) antara Sub-CPMK, CPMK, dan CPL. Bobot pada Tabel 1.6 merupakan kontribusi setiap Sub-CPMK terhadap nilai akhir sekaligus dasar pengukuran ketercapaian CPL.

Tabel 1.5 Korelasi Sub-CPMK terhadap CPMK

Sub-CPMK	CPMK-1	CPMK-2	CPMK-3	CPMK-4
Sub-CPMK1	√	—	—	—
Sub-CPMK2	√	—	—	—
Sub-CPMK3	—	√	—	—
Sub-CPMK4	—	√	—	—
Sub-CPMK5	—	—	√	—
Sub-CPMK6	—	—	√	—
Sub-CPMK7	—	—	—	√
Sub-CPMK8	—	—	—	√

Tabel 1.6 Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK dan bobot penilaian (%)

Sub-CPMK	CPL-01	CPL-05	CPL-07	CPL-09	Bobot
Sub-CPMK1	15				15
Sub-CPMK2	15				15
Sub-CPMK3		14			14
Sub-CPMK4		7			7
Sub-CPMK5			7	7	14
Sub-CPMK6			7	7	14
Sub-CPMK7	7			7	14
Sub-CPMK8	4			3	7
Jumlah	41	21	14	24	100

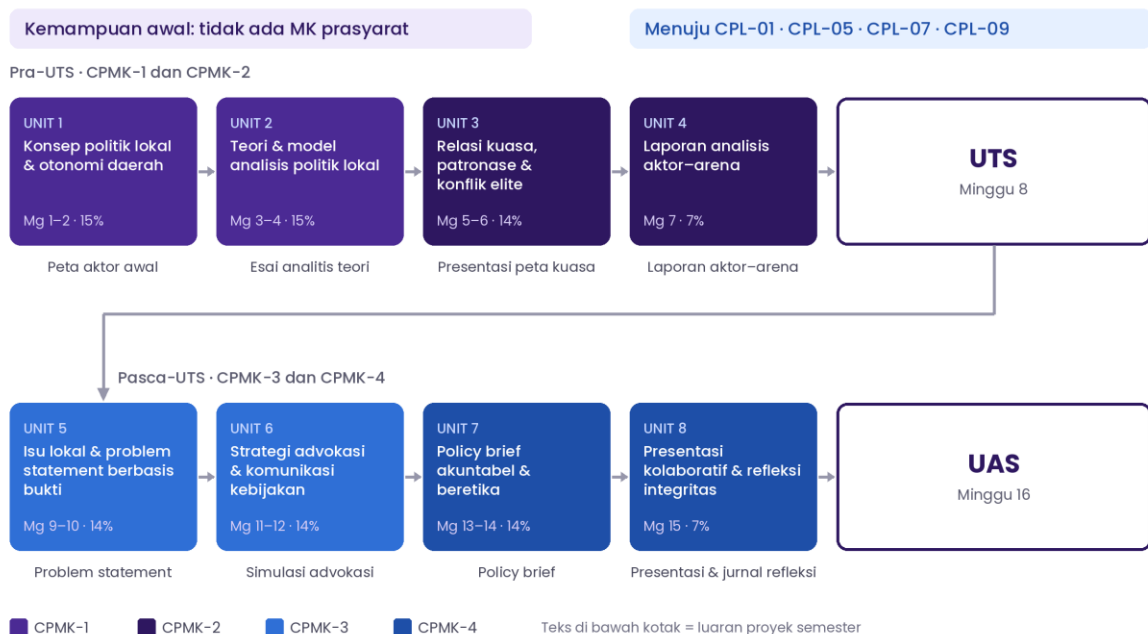
Tabel 1.7 Peta unit modul

Unit	Judul Unit	Sub-CPMK	Minggu	Luaran Proyek
1	Konsep Politik Lokal, Desentralisasi, dan Otonomi Daerah	Sub-CPMK1	1–2	Peta aktor awal
2	Teori dan Model Analisis Politik Lokal	Sub-CPMK2	3–4	Esai analitis teori
3	Relasi Kekuasaan, Patronase, dan Konflik Elite	Sub-CPMK3	5–6	Presentasi peta kuasa
4	Laporan Analisis Aktor-Arena	Sub-CPMK4	7	Laporan aktor-arena
—	Evaluasi Tengah Semester (UTS)	Sub-CPMK1–4	8	—
5	Isu Politik Lokal dan <i>Problem Statement</i> Berbasis Bukti	Sub-CPMK5	9–10	<i>Problem statement</i>
6	Strategi Advokasi dan Komunikasi Kebijakan	Sub-CPMK6	11–12	Simulasi advokasi
7	<i>Policy Brief</i> yang Akuntabel dan Beretika	Sub-CPMK7	13–14	<i>Policy brief</i>

Unit	Judul Unit	Sub-CPMK	Minggu	Luaran Proyek
8	Presentasi Kolaboratif dan Refleksi Integritas	Sub-CPMK8	15	Presentasi final dan jurnal refleksi
—	Evaluasi Akhir Semester (UAS)	Sub-CPMK5–8	16	—

1.5 Peta Alur Belajar

Alur belajar disusun berjenjang. Pada paruh pertama semester (pra-UTS), mahasiswa membangun landasan konsep dan teori, lalu menerapkannya untuk menganalisis relasi kekuasaan pada satu kasus empiris hingga menghasilkan laporan analisis aktor-arena. Pada paruh kedua (pasca-UTS), hasil analisis tersebut menjadi dasar untuk merumuskan isu, merancang strategi advokasi, menyusun *policy brief*, dan mempresentasikannya dalam simulasi forum advokasi publik.



Gambar 1.1 Peta alur belajar dan luaran proyek semester

1.6 Strategi Pembelajaran dan Proyek Semester

1.6.1 Model, Metode, dan Modalitas

Pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*) dengan dua metode utama. *Case-Based Learning* digunakan untuk mengoperasionalkan konsep dan teori melalui analisis kasus pemerintahan daerah di Sulawesi dan KTl. *Project-Based Learning* digunakan untuk menghasilkan luaran bertahap yang bermuara pada *policy brief*. Teknik yang dipakai antara lain diskusi kelompok kecil, debat terstruktur, *gallery walk*, *peer review*, dan simulasi forum advokasi.

Perkuliahan dilaksanakan secara bauran (*blended learning*). Sesi luring di kelas dipakai untuk diskusi, presentasi, dan umpan balik langsung; sesi daring melalui LMS dipakai untuk video pengantar, bahan bacaan, forum diskusi asinkron, pengumpulan tugas, dan konsultasi.

Tabel 1.8 Estimasi beban belajar per minggu (3 sks)

Bentuk Kegiatan	Rincian	Waktu
Kegiatan Belajar Terbimbing (PB)	Tatap muka atau sinkron: 3 × 50 menit	150 menit
Penugasan Terstruktur (PT)	Tugas kelompok atau individu: 3 × 60 menit	180 menit
Kegiatan Mandiri (KM)	Membaca, mengumpulkan data, refleksi: 3 × 60 menit	180 menit
Jumlah		510 menit

1.6.2 Proyek Semester

Seluruh unit terhubung dalam satu proyek semester berjudul "**Laporan Kajian Politik Lokal, _Policy Brief_ Advokasi Kebijakan, dan Simulasi Forum Advokasi Publik atas Satu Kasus Empiris di Kawasan Timur Indonesia**". Mahasiswa bekerja dalam kelompok lintas disiplin beranggotakan 3–4 orang dan memilih satu kabupaten/kota di Sulawesi atau KTI sebagai unit analisis. Luaran proyek dikembangkan secara bertahap sebagai berikut.

Tabel 1.9 Tahapan luaran proyek semester

Minggu	Luaran	Unit	Bentuk
2	Peta aktor awal kabupaten/kota yang dipilih	1	Kelompok
4	Esai analitis dengan dua kerangka teori	2	Individu
6	Presentasi peta relasi kekuasaan (koalisi, patronase, konflik elite)	3	Kelompok
7	Laporan analisis aktor-arena	4	Individu
10	<i>Problem statement</i> advokasi berbasis data terbuka dan SPBE	5	Kelompok
12	Strategi advokasi dan simulasi presentasi kepada pemangku kepentingan	6	Kelompok
14	<i>Policy brief</i> advokasi kebijakan	7	Kelompok
15	Presentasi final dan jurnal refleksi	8	Kelompok dan individu

Ketentuan rujukan

Setiap luaran proyek wajib menggunakan minimal lima sumber dari daftar pustaka mata kuliah, ditambah data empiris yang dapat ditelusuri (dokumen resmi, data KPU, portal pemerintah daerah, atau berita terverifikasi).

1.7 Sistem Penilaian

Penilaian dilakukan secara formatif dan sumatif. Penilaian formatif (latihan, lembar kerja, partisipasi) dipakai untuk memantau kemajuan dan memberi umpan balik. Penilaian sumatif menentukan nilai akhir dengan komponen dan bobot berikut.

Tabel 1.10 Komponen penilaian

No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Sub-CPMK yang diukur
1	Kuis, esai, dan tes tertulis Unit 1–3	23	Sub-CPMK1–3
2	Laporan Aktor-Arena	7	Sub-CPMK4
3	Ujian Tengah Semester (UTS)	21	Sub-CPMK1–3
4	Tes <i>problem statement</i> dan simulasi advokasi	14	Sub-CPMK5–6
5	<i>Policy Brief</i>	10	Sub-CPMK7
6	Presentasi final dan jurnal refleksi	7	Sub-CPMK8
7	Ujian Akhir Semester (UAS)	18	Sub-CPMK5–7
	Total	100	

Bobot komponen disusun agar jumlahnya per Sub-CPMK sama dengan bobot pada Tabel 1.6. Rincian silang komponen dan Sub-CPMK disajikan pada Bab X.

Tabel 1.11 Konversi nilai akhir program sarjana

Nilai Akhir (Skala 100)	Huruf	Bobot
85,00 – 100,00	A	4,00
75,00 – 84,99	B	3,00
65,00 – 74,99	C	2,00
50,00 – 64,99	D	1,00
0,00 – 49,99	E	0,00

Kisi-kisi UTS dan UAS serta rubrik penilaian disajikan pada unit terkait dan Bab X. Setiap nilai dicatat per Sub-CPMK sehingga ketercapaian CPMK dan CPL dapat dihitung di SI-OBE menggunakan bobot pada Tabel 1.6.

1.8 Ketuntasan Belajar dan Tindak Lanjut

Di akhir setiap unit, hitung tingkat penguasaan Anda terhadap latihan dengan rumus berikut.

Rumus tingkat penguasaan

$$\text{Tingkat penguasaan} = (\text{skor yang diperoleh} \div \text{skor maksimum}) \times 100\%$$

Tabel 1.12 Kriteria penguasaan dan tindak lanjut

Tingkat Penguasaan	Kategori	Tindak Lanjut
90% – 100%	Sangat baik	Lanjut ke unit berikutnya; kerjakan kegiatan pengayaan.
80% – 89%	Baik	Lanjut ke unit berikutnya.
70% – 79%	Cukup	Lanjut ke unit berikutnya setelah meninjau bagian yang masih lemah.
< 70%	Kurang	Pelajari ulang unit, kerjakan tugas remedial, dan konsultasikan kepada dosen.

Ambang ketuntasan 70% berlaku untuk latihan formatif setiap unit. Kelulusan mata kuliah ditentukan oleh nilai akhir sesuai peraturan akademik Universitas Ichsan Gorontalo yang berlaku.

Refleksi awal

Sebelum memulai Unit 1, tuliskan dalam 3–5 kalimat: peristiwa politik lokal apa yang pernah Anda amati di daerah asal Anda, siapa saja aktor yang terlibat, dan apa yang ingin Anda pahami dari mata kuliah ini. Simpan tulisan ini sebagai bahan jurnal refleksi pada Unit 8.

BAB II · UNIT 1 · MINGGU 1–2

Politik Lokal, Desentralisasi, dan Otonomi Daerah

Konsep dasar, kerangka regulasi, sejarah, serta aktor dan arena kekuasaan daerah

2.1 Capaian Pembelajaran Unit

Sub-CPMK1

Menjelaskan konsep dasar politik lokal, kerangka desentralisasi, dan otonomi daerah serta mengidentifikasi aktor-aktor utama dalam arena kekuasaan pemerintahan daerah di Indonesia.

Indikator capaian — mahasiswa mampu:

- Menjelaskan pengertian politik lokal dan membedakannya dari politik nasional berdasarkan dimensi kewenangan, arena, dan aktor.
- Mengidentifikasi prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah sesuai kerangka UU Nomor 23 Tahun 2014.
- Menyebutkan minimal lima kategori aktor utama dalam arena kekuasaan pemerintahan daerah beserta peran formalnya.
- Menghubungkan konsep desentralisasi dengan konteks historis reformasi politik Indonesia pasca-1998.

CPMK	CPL yang didukung	Bobot Sub-CPMK	Estimasi Waktu
CPMK-1	CPL-01	15%	2 minggu (1.020 menit)

2.2 Pemantik

Mari memulai

Coba ingat pemilihan kepala daerah terakhir di kabupaten/kota asal Anda. Siapa saja yang mencalonkan diri? Siapa yang mendukung mereka di belakang layar: partai, pengusaha, tokoh adat, tokoh agama, atau keluarga besar tertentu?

Sekarang bayangkan keputusan pembangunan jalan atau pasar di daerah Anda. Apakah keputusan itu diambil di Jakarta, di ibu kota provinsi, atau di kantor bupati/wali kota? Tuliskan jawaban awal Anda dalam 3–4 kalimat. Di akhir unit, bandingkan jawaban tersebut dengan pemahaman baru Anda.

2.3 Peta Konsep



Gambar 2.1 Peta konsep Unit 1

2.4 Uraian Materi

2.4.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Politik Lokal

Politik lokal adalah proses perebutan, pembagian, dan penggunaan kekuasaan serta sumber daya publik pada aras pemerintahan di bawah pemerintah pusat, yaitu provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Politik lokal tidak sekadar "politik nasional dalam ukuran kecil". Ia memiliki kewenangan, arena, dan aktor yang khas, sehingga dinamikanya sering berbeda dari apa yang terjadi di tingkat nasional.

Tiga dimensi berikut membantu membedakan politik lokal dari politik nasional.

Tabel 2.1 Perbedaan politik lokal dan politik nasional

Dimensi	Politik lokal	Politik nasional
Kewenangan	Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, seperti pendidikan dasar, kesehatan, pekerjaan umum, dan administrasi kependudukan.	Urusan absolut dan kebijakan nasional, seperti pertahanan, politik luar negeri, moneter, dan yustisi.
Arena	Pilkada, DPRD, birokrasi daerah, pembahasan APBD, serta arena informal seperti lembaga adat, jaringan keagamaan, dan ikatan kekerabatan.	Pemilu presiden dan DPR, kabinet, lembaga negara pusat, dan kebijakan anggaran nasional.
Aktor	Kepala daerah, anggota DPRD, pengurus partai daerah, birokrat daerah, pengusaha lokal, tokoh adat dan agama.	Presiden, menteri, anggota DPR, pimpinan partai nasional, dan kelompok bisnis nasional.

Kedekatan antara pemimpin dan warga membuat politik lokal sangat dipengaruhi relasi personal. Dukungan politik sering dibangun melalui ikatan keluarga, marga, kampung, dan jaringan pertemanan, bukan semata program partai. Inilah sebabnya analisis politik lokal harus memperhatikan faktor formal (aturan dan lembaga) sekaligus faktor informal (norma, jaringan, dan kebiasaan).

2.4.2 Desentralisasi dan Otonomi Daerah

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan **desentralisasi** sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas

otonomi. Adapun **otonomi daerah** adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dijalankan dengan tiga asas:

- **Desentralisasi:** urusan diserahkan kepada daerah otonom dan menjadi tanggung jawab penuh daerah.
- **Dekonsentrasi:** pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan kepada instansi vertikal di daerah.
- **Tugas pembantuan:** penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah, atau dari provinsi kepada kabupaten/kota, untuk melaksanakan sebagian urusan yang tetap menjadi kewenangan pihak yang menugaskan.

UU 23/2014 juga membagi urusan pemerintahan ke dalam tiga klasifikasi. **Urusan absolut** sepenuhnya menjadi kewenangan pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. **Urusan konkuren** dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; urusan inilah yang menjadi dasar otonomi daerah, dan terdiri atas urusan wajib (yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak) serta urusan pilihan. **Urusan pemerintahan umum** menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh kepala daerah di wilayahnya.

Dalam literatur administrasi pembangunan, Turner dan Hulme (1997) membedakan beberapa bentuk desentralisasi. Desentralisasi **politik** memberi warga dan wakilnya kekuasaan lebih besar dalam pengambilan keputusan publik; desentralisasi **administratif** memindahkan tanggung jawab perencanaan dan pelaksanaan, baik dalam bentuk dekonsentrasi, delegasi, maupun devolusi; dan desentralisasi **fiskal** memberi daerah sumber penerimaan dan keleluasaan belanja. Indonesia pascareformasi menjalankan ketiganya secara bersamaan, sehingga daerah memperoleh kewenangan, anggaran, dan pemimpin yang dipilih sendiri dalam waktu relatif singkat.

2.4.3 Konteks Historis: dari Sentralisasi ke Otonomi

Pada masa Orde Baru, UU Nomor 5 Tahun 1974 menempatkan daerah dalam kendali ketat pemerintah pusat. Kepala daerah praktis ditentukan oleh pusat, dan daerah lebih berfungsi sebagai pelaksana kebijakan nasional. Krisis 1997–1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru membuka jalan bagi perubahan mendasar.

Tabel 2.2 Tonggak regulasi pemerintahan daerah

Periode	Regulasi	Ciri utama
1974–1999	UU 5/1974	Sentralistik; daerah menjadi perpanjangan tangan pusat.
1999–2004	UU 22/1999 dan UU 25/1999 (berlaku efektif 2001)	Otonomi luas bertumpu pada kabupaten/kota; kepala daerah dipilih DPRD; perimbangan keuangan pusat-daerah.
2004–2014	UU 32/2004 dan UU 33/2004	Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sejak 2005; penataan hubungan pusat-daerah.

Periode	Regulasi	Ciri utama
2014–kini	UU 23/2014 beserta perubahannya; UU Pilkada (UU 1/2015, UU 8/2015, UU 10/2016)	Pembagian urusan konkuren yang lebih rinci; sebagian kewenangan kabupaten/kota ditarik ke provinsi; pilkada serentak bertahap menuju pilkada serentak nasional.

Desentralisasi juga melahirkan gelombang pemekaran daerah. Provinsi Gorontalo sendiri merupakan provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara melalui UU Nomor 38 Tahun 2000. Pemekaran membuka ruang bagi aspirasi lokal, tetapi juga menciptakan jabatan, anggaran, dan proyek baru yang menjadi objek perebutan elite.

Hadiz (2010) mengingatkan bahwa desentralisasi tidak otomatis melahirkan demokrasi lokal yang sehat. Di banyak daerah, kelompok kepentingan lama yang tumbuh pada masa Orde Baru justru berhasil menyesuaikan diri dan menguasai lembaga-lembaga demokrasi baru, seperti partai, DPRD, dan pilkada. Karena itu, analisis politik lokal perlu bertanya: siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh desentralisasi di suatu daerah?

2.4.4 Aktor dan Arena Kekuasaan Daerah

Aktor adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dan sumber daya untuk memengaruhi keputusan publik. **Arena** adalah ruang, baik formal maupun informal, tempat para aktor berinteraksi, bernegosiasi, dan berkonflik. Pemahaman tentang keduanya menjadi fondasi seluruh analisis dalam mata kuliah ini.

Tabel 2.3 Kategori aktor utama politik lokal

Kategori aktor	Contoh	Peran formal atau sumber pengaruh
Eksekutif daerah	Gubernur, bupati/wali kota, dan wakilnya	Memimpin pemerintahan daerah, menyusun rancangan APBD dan perda, mengangkat pejabat.
Legislatif daerah	Anggota dan pimpinan DPRD	Fungsi pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan.
Birokrasi daerah	Sekretaris daerah, kepala perangkat daerah, ASN	Melaksanakan kebijakan dan mengelola program serta anggaran.
Partai politik	Pengurus partai tingkat daerah	Mengusung calon kepala daerah dan menempatkan kader di DPRD.
Pengusaha lokal	Kontraktor, pemilik usaha perkebunan, tambang, perdagangan	Pendanaan politik, kepentingan atas proyek dan perizinan.
Tokoh adat dan agama	Pemangku adat, ulama, pendeta, pimpinan ormas keagamaan	Legitimasi kultural dan mobilisasi dukungan massa.
Masyarakat sipil dan media	LSM, organisasi mahasiswa, jurnalis, media lokal	Advokasi, kontrol sosial, dan pembentukan opini publik.
Penyelenggara pemilu dan penegak hukum	KPU, Bawaslu, kepolisian, Kejaksaan	Mengatur kompetisi elektoral dan menegakkan aturan.
Aktor supra-lokal	Kementerian, pemerintah provinsi, pengurus partai pusat	Regulasi, transfer dana, dan rekomendasi pencalonan.

Arena kekuasaan dapat dibedakan menjadi **arena formal**, seperti pilkada, rapat paripurna DPRD, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), dan pembahasan APBD, serta **arena informal**, seperti pertemuan keluarga besar, forum adat, jaringan pengajian atau jemaat, dan pertemuan tertutup antara elite. Keputusan penting sering kali disepakati di arena informal sebelum disahkan di arena formal.

Catatan penting

Gunakan istilah **aktor** untuk pihak yang memiliki kepentingan dan sumber daya, bukan sekadar pihak yang disebut dalam berita. Seorang tokoh baru layak masuk peta aktor jika Anda dapat menunjukkan kepentingannya dan cara ia memengaruhi keputusan.

2.5 Studi Kasus

Kabupaten Tanjung Harapan (kasus ilustrasi)

Kabupaten Tanjung Harapan adalah kabupaten hasil pemekaran di Sulawesi. Menjelang pilkada, bupati petahana maju kembali bersama wakil baru dengan dukungan tiga partai. Ketua DPRD, yang berasal dari partai berbeda, mencalonkan diri sebagai penantang. Sejumlah kontraktor yang selama ini mengerjakan proyek jalan kabupaten diketahui aktif menghadiri kegiatan kampanye petahana, sedangkan dewan adat setempat secara terbuka menyatakan dukungan kepada penantang yang berasal dari keluarga pemangku adat.

Di tengah kampanye, sebuah LSM lokal merilis temuan tentang keterlambatan pembangunan puskesmas yang dibiayai APBD. Media daerah memberitakan temuan itu secara luas, dan Bawaslu menerima beberapa laporan dugaan mobilisasi ASN.

Catatan: kasus ini disusun sebagai ilustrasi pembelajaran dan tidak merujuk pada daerah tertentu.

Pertanyaan analisis:

1. Identifikasi minimal lima aktor dalam kasus ini beserta kategori dan kepentingannya.
2. Arena formal dan informal apa saja yang tampak dalam kasus tersebut?
3. Urusan pemerintahan apa yang menjadi sumber perdebatan dalam kasus ini, dan apakah urusan itu termasuk kewenangan kabupaten menurut UU 23/2014?
4. Bagaimana status Tanjung Harapan sebagai daerah pemekaran dapat memengaruhi dinamika kekuasaannya?

2.6 Aktivitas Pembelajaran

Minggu 1 — Eksplorasi konsep dan pemetaan awal

Luring (kelas)

- Dosen memaparkan peta konsep politik lokal, desentralisasi, dan otonomi daerah, lalu membuka tanya-jawab berdasarkan pertanyaan yang telah diunggah mahasiswa di forum LMS.
- Mahasiswa berdiskusi dalam kelompok 3–4 orang untuk memetakan aktor dalam satu kasus pemerintahan daerah di KTI yang dipilih bersama.
- Setiap kelompok mempresentasikan pemetaan awal secara lisan selama 3 menit.

Daring (LMS)

- Tonton video pengantar tentang kontrak perkuliahan, peta jalan semester, dan pertanyaan pemantik.
- Unduh RPS dan bahan bacaan awal (Hadiz 2010; Turner & Hulme 1997; UU 23/2014).

- Tuliskan satu pertanyaan atau pengamatan tentang dinamika politik di daerah asal Anda di forum LMS sebelum sesi luring.

Luaran: Kelompok proyek terbentuk dan kasus kabupaten/kota awal telah dipilih.

Minggu 2 — Peta aktor dan galeri presentasi

Luring (kelas)

- Setiap kelompok menampilkan peta aktor pada kertas plano atau tayangan dalam format *gallery walk*.
- Kelompok lain memberi umpan balik tertulis menggunakan lembar penilaian sejawat; kelompok merevisi peta berdasarkan masukan.
- Dosen menutup dengan sintesis konsep arena kekuasaan, dilanjutkan kuis tertulis singkat di akhir sesi.

Daring (LMS)

- Lengkapi peta aktor dengan data dari portal pemerintah daerah atau sumber terbuka lain.
- Pelajari panduan teknis penyusunan *actor mapping* di LMS dan manfaatkan forum konsultasi daring bila diperlukan.

Luaran: Peta aktor awal (diagram atau matriks) dengan narasi 400–500 kata.

2.7 Rangkuman

- Politik lokal adalah perebutan dan penggunaan kekuasaan serta sumber daya publik di aras daerah, yang berbeda dari politik nasional dalam hal kewenangan, arena, dan aktor.
- UU 23/2014 mengatur desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, serta membagi urusan pemerintahan menjadi urusan absolut, konkuren, dan umum.
- Desentralisasi dapat berbentuk politik, administratif, dan fiskal; Indonesia pascareformasi menjalankan ketiganya secara bersamaan.
- Perjalanan dari UU 5/1974 ke UU 22/1999, UU 32/2004, dan UU 23/2014 menunjukkan pergeseran dari sentralisasi menuju otonomi, disertai pilkada langsung dan pemekaran daerah.
- Aktor politik lokal mencakup eksekutif, legislatif, birokrasi, partai, pengusaha, tokoh adat dan agama, masyarakat sipil, penyelenggara pemilu, serta aktor supra-lokal, yang berinteraksi di arena formal dan informal.

2.8 Latihan

Kerjakan latihan berikut secara mandiri. Bagian A terdiri atas 5 soal pilihan ganda (skor 10 per soal); Bagian B terdiri atas 2 soal uraian (skor 25 per soal). Skor maksimum 100.

A. Pilihan Ganda

1. Dimensi yang **paling tepat** untuk membedakan politik lokal dari politik nasional adalah ...
 - A. jumlah penduduk dan luas wilayah
 - B. kewenangan, arena, dan aktor
 - C. ideologi partai dan sistem pemilu
 - D. besaran anggaran dan jumlah pegawai

2. Menurut UU 23/2014, pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat disebut ...
 - A. desentralisasi
 - B. tugas pembantuan
 - C. dekonsentrasi
 - D. devolusi
3. Berikut ini yang termasuk urusan pemerintahan absolut adalah ...
 - A. pendidikan
 - B. pekerjaan umum
 - C. kesehatan
 - D. yustisi
4. Undang-undang yang pertama kali mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat adalah ...
 - A. UU 5/1974
 - B. UU 22/1999
 - C. UU 32/2004
 - D. UU 23/2014
5. Pertemuan keluarga besar yang menyepakati calon kepala daerah sebelum partai menetapkan pencalonan merupakan contoh ...
 - A. arena formal
 - B. arena informal
 - C. urusan konkuren
 - D. desentralisasi fiskal

B. Uraian

1. Jelaskan perbedaan desentralisasi politik, administratif, dan fiskal, lalu berikan satu contoh penerapan masing-masing di daerah asal Anda.
2. Hadiz (2010) berpendapat bahwa desentralisasi dapat dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan lama. Jelaskan argumen tersebut dan kaitkan dengan satu contoh dinamika politik lokal di Kawasan Timur Indonesia.

2.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 2.4 Kunci jawaban pilihan ganda

No.	Kunci	Pembahasan singkat
1	B	Politik lokal dibedakan oleh kewenangan yang diserahkan, arena tempat kekuasaan diperebutkan, dan aktor yang terlibat.
2	C	Dekonsentrasi adalah pelimpahan kepada gubernur sebagai wakil pusat dan instansi vertikal; desentralisasi adalah penyerahan kepada daerah otonom.
3	D	Urusan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
4	C	Di bawah UU 22/1999 kepala daerah dipilih DPRD; pilkada langsung diatur UU 32/2004 dan dimulai tahun 2005.
5	B	Pertemuan tersebut berlangsung di luar lembaga resmi, sehingga termasuk arena informal.

Pedoman soal uraian nomor 1

- Definisi ketiga bentuk desentralisasi tepat (skor maksimal 10).
- Contoh untuk setiap bentuk relevan dan konkret, misalnya pilkada, pengelolaan puskesmas oleh dinas kesehatan, dan penerimaan pajak daerah (skor maksimal 10).
- Penjelasan runtut dan menggunakan istilah yang tepat (skor maksimal 5).

Pedoman soal uraian nomor 2

- Menjelaskan argumen bahwa kelompok kepentingan lama menyesuaikan diri dan menguasai lembaga demokrasi baru (skor maksimal 10).
- Contoh kasus KTI relevan dan dianalisis, bukan sekadar disebutkan (skor maksimal 10).
- Argumen logis dan didukung rujukan (skor maksimal 5).

2.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada Subbab 1.8. Jika tingkat penguasaan Anda **70% atau lebih**, lanjutkan ke unit berikutnya. Jika kurang dari 70%, lakukan remedial berikut sebelum melanjutkan.

Kondisi	Tindak lanjut
< 70% (remedial)	Baca ulang Subbab 2.4.2 dan 2.4.4, susun ulang Tabel 2.3 dengan contoh dari daerah Anda sendiri, lalu kerjakan kembali soal yang salah.
≥ 90% (pengayaan)	Bandingkan pembagian urusan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam Lampiran UU 23/2014 untuk satu bidang (misalnya pendidikan), lalu tulis catatan 300 kata tentang dampaknya bagi politik lokal.

2.11 Refleksi dan Nilai ICBSA-N

Refleksi diri

1. Apa perubahan terbesar pemahaman Anda tentang politik di daerah asal setelah mempelajari unit ini?
2. Aktor mana yang sebelumnya tidak Anda sadari berpengaruh?
3. Bagaimana Anda memastikan data yang Anda pakai dalam peta aktor dapat dipertanggungjawabkan?

NILAI ICBSA-N

Integrity dan Nationalism: berbagi pengetahuan tentang daerah sendiri secara jujur dan apa adanya, serta memahami otonomi daerah sebagai bagian dari penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan pemisahan dari negara.

2.12 Referensi Unit

Hadiz, V. R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford University Press.

Turner, M., & Hulme, D. (1997). *Governance, Administration and Development: Making the State Work*. Macmillan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

Azis, I. J., & Widodo, T. (2010). Decentralization, governance, and economic performance in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 11(1).

BAB III · UNIT 2 · MINGGU 3–4

Teori dan Model Analisis Politik Lokal

Pluralisme, elitisme, neo-institusionalisme, patron-klien, dan modal sosial

3.1 Capaian Pembelajaran Unit

Sub-CPMK2

Membandingkan kerangka teori dan model analisis politik lokal (pluralisme, elitisme, neo-institusionalisme, dan pendekatan patron-klien) serta menerapkannya untuk membaca dinamika pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia.

Indikator capaian — mahasiswa mampu:

- Mendeskripsikan asumsi dasar, unit analisis, serta kekuatan dan kelemahan empat pendekatan teori politik lokal: pluralisme, elitisme, neo-institusionalisme, dan patron-klien.
- Membandingkan keempat pendekatan tersebut berdasarkan relevansinya untuk konteks desentralisasi Indonesia.
- Mengidentifikasi pendekatan yang paling tepat untuk menjelaskan satu kasus dinamika pemerintahan daerah di KTI disertai justifikasi konseptual.
- Mengaitkan konsep modal sosial (*social capital*) dengan kapasitas demokrasi lokal di tingkat kabupaten atau kota.

CPMK	CPL yang didukung	Bobot Sub-CPMK	Estimasi Waktu
CPMK-1	CPL-01	15%	2 minggu (1.020 menit)

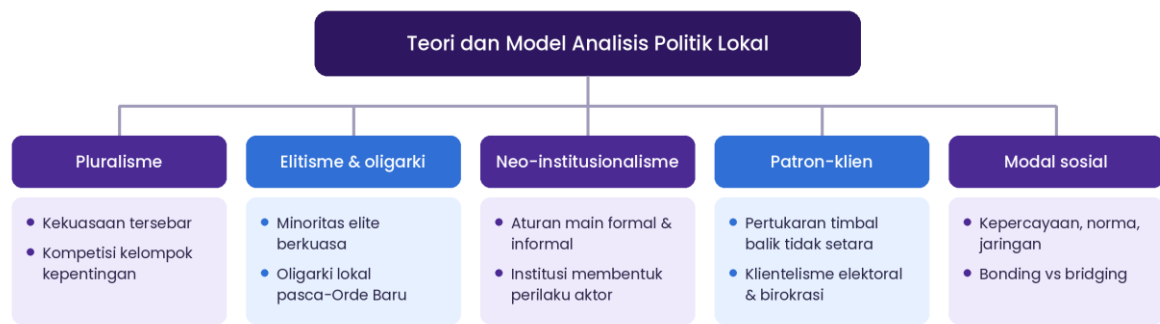
3.2 Pemantik

Mari memulai

Dua mahasiswa mengamati pilkada yang sama. Mahasiswa pertama menyimpulkan: "Pemenangnya ditentukan segelintir keluarga kaya." Mahasiswa kedua menyimpulkan: "Pemenangnya adalah kandidat yang paling pandai merangkul banyak kelompok." Keduanya melihat fakta yang sama, tetapi sampai pada kesimpulan yang berbeda.

Mengapa hal itu bisa terjadi? Menurut Anda, apakah salah satu dari mereka keliru, atau mereka sebenarnya memakai "kacamata" yang berbeda?

3.3 Peta Konsep



Gambar 3.1 Peta konsep Unit 2

3.4 Uraian Materi

Teori berfungsi sebagai kacamata analisis: ia menentukan pertanyaan apa yang diajukan, data apa yang dicari, dan bagaimana data itu ditafsirkan. Tidak ada satu teori yang mampu menjelaskan semua kasus. Karena itu, analisis politik lokal perlu menguasai beberapa pendekatan dan mampu memilih yang paling menerangkan kasus yang dikaji.

3.4.1 Pluralisme

Pendekatan pluralis, yang dikembangkan antara lain oleh Robert Dahl melalui studinya tentang politik kota New Haven, berangkat dari asumsi bahwa kekuasaan dalam masyarakat demokratis **tersebar** di antara banyak kelompok. Tidak ada satu kelompok yang menguasai semua bidang kebijakan; kelompok yang berpengaruh dalam urusan pendidikan dapat berbeda dari kelompok yang berpengaruh dalam urusan pembangunan fisik. Keputusan publik lahir dari kompetisi, tawar-menawar, dan kompromi antarkelompok kepentingan.

Unit analisisnya adalah **kelompok kepentingan** dan proses pengambilan keputusan pada isu-isu tertentu. Kekuatan pendekatan ini terletak pada kepekaannya terhadap keragaman aktor dan dinamika negosiasi. Kelemahannya, pendekatan ini cenderung mengabaikan ketimpangan sumber daya antarkelompok serta isu-isu yang sengaja tidak diangkat ke agenda publik.

3.4.2 Elitisme dan Oligarki

Pendekatan elitis, yang berakar pada pemikiran Mosca, Pareto, dan C. Wright Mills, berpendapat bahwa dalam setiap masyarakat kekuasaan selalu terkonsentrasi pada **minoritas elite** yang terorganisasi. Pemilu dan lembaga perwakilan tidak menghapus dominasi elite, tetapi hanya mengatur sirkulasi di antara mereka.

Dalam konteks Indonesia, Robison dan Hadiz (2004) mengembangkan pendekatan **oligarki**: kekuasaan politik dan ekonomi dikuasai aliansi elite yang tumbuh pada masa Orde Baru. Setelah reformasi, aliansi ini tidak hilang, melainkan melakukan reorganisasi dan memanfaatkan partai, pemilu, dan desentralisasi untuk mempertahankan akses terhadap sumber daya negara. Hadiz (2010) menunjukkan bahwa proses ini juga berlangsung di tingkat daerah. Pendekatan ini kuat dalam menjelaskan ketimpangan kekuasaan, tetapi kerap dikritik karena kurang memberi ruang bagi perubahan dari bawah dan peran masyarakat sipil.

3.4.3 Neo-institusionalisme

Neo-institusionalisme menekankan bahwa **institusi**, yaitu aturan main formal (undang-undang, perda, tata tertib DPRD) maupun informal (norma, kebiasaan, konvensi), membentuk perilaku aktor. March dan Olsen (1989) menegaskan bahwa aktor bertindak menurut "logika kepantasan" yang dibentuk institusi, sedangkan North (1990) memandang institusi sebagai aturan main yang membatasi dan mengarahkan pilihan aktor.

Pendekatan ini sangat berguna untuk menganalisis dampak desain kelembagaan: misalnya, bagaimana ambang batas pencalonan kepala daerah mendorong koalisi partai, atau bagaimana aturan pembahasan APBD membuka ruang tawar-menawar eksekutif dan DPRD. Kelemahannya, pendekatan ini kadang kurang menjelaskan mengapa aktor yang kuat mampu membelokkan atau mengabaikan aturan.

3.4.4 Pendekatan Patron-Klien

James C. Scott (1972) mendefinisikan relasi patron-klien sebagai hubungan pertukaran dua pihak yang **tidak setara**: patron yang memiliki sumber daya lebih besar memberikan perlindungan, bantuan, atau akses, sedangkan klien membalas dengan dukungan, kesetiaan, dan jasa. Relasi ini bersifat personal, timbal balik, dan dapat berlangsung lama.

Dalam politik kontemporer, relasi ini hadir sebagai **klientelisme**: pertukaran dukungan politik dengan keuntungan material, seperti uang, bantuan sosial, proyek, atau jabatan. Pendekatan ini sangat relevan untuk membaca politik lokal di Indonesia yang sarat ikatan personal, tetapi berisiko menyederhanakan pemilih sebagai pihak yang pasif dan semata-mata transaksional.

3.4.5 Modal Sosial dan Kapasitas Demokrasi Lokal

Putnam (1993), melalui studinya tentang pemerintahan regional di Italia, menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh **modal sosial**, yaitu kepercayaan, norma timbal balik, dan jaringan keterlibatan warga. Daerah dengan tradisi asosiasi warga yang kuat cenderung memiliki pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.

Modal sosial dapat bersifat **mengikat** (*bonding*), yaitu memperkuat solidaritas di dalam kelompok yang homogen seperti keluarga atau marga, dan **menjembatani** (*bridging*), yaitu menghubungkan kelompok-kelompok yang berbeda. Modal sosial yang terlalu bertumpu pada ikatan *bonding* dapat menjadi saluran patronase, sedangkan modal sosial *bridging* memperkuat masyarakat sipil dan kontrol publik. Hikam (1999) menegaskan pentingnya masyarakat sipil yang mandiri sebagai penyeimbang kekuasaan negara.

3.4.6 Membandingkan dan Memilih Pendekatan

Tabel 3.1 Perbandingan pendekatan teori politik lokal

Aspek	Pluralisme	Elitisme/oligarki	Neo-institusionalisme	Patron-klien
Asumsi dasar	Kekuasaan tersebar di banyak kelompok	Kekuasaan terkonsentrasi pada elite	Aturan main membentuk perilaku	Pertukaran timbal balik tidak setara
Unit analisis	Kelompok kepentingan, keputusan per isu	Elite dan jaringan penguasaan sumber daya	Aturan formal dan informal	Relasi patron, broker, dan klien

Aspek	Pluralisme	Elitisme/oligarki	Neo-institusionalisme	Patron-klien
Pertanyaan kunci	Siapa memenangkan keputusan apa?	Siapa yang menguasai sumber daya?	Aturan apa yang membentuk pilihan aktor?	Apa yang dipertukarkan, oleh siapa?
Kekuatan	Peka terhadap keragaman aktor	Menjelaskan ketimpangan kekuasaan	Menjelaskan dampak desain kelembagaan	Menangkap relasi personal di daerah
Keterbatasan	Mengabaikan ketimpangan sumber daya	Kurang melihat perubahan dari bawah	Kurang menjelaskan pelanggaran aturan	Cenderung melihat pemilih pasif

Dalam memilih pendekatan, gunakan tiga pertanyaan penuntun: (1) apa pertanyaan utama yang ingin dijawab; (2) data apa yang tersedia; dan (3) pendekatan mana yang paling mampu menjelaskan pola dalam data tersebut. Dalam banyak kasus di KTI, kombinasi dua pendekatan, misalnya oligarki dengan patron-klien atau neo-institusionalisme dengan modal sosial, menghasilkan penjelasan yang lebih utuh.

3.5 Studi Kasus

Kota Teluk Biru (kasus ilustrasi)

Di Kota Teluk Biru, wali kota terpilih berasal dari keluarga pengusaha perikanan yang telah berpengaruh sejak dekade 1990-an. Kampanyenya didukung koalisi empat partai yang terbentuk karena tidak ada partai yang memenuhi ambang batas pencalonan sendiri. Di tingkat kelurahan, tim sukses menyalurkan bantuan perahu dan alat tangkap kepada kelompok nelayan. Sementara itu, forum lintas agama dan asosiasi pedagang pasar aktif mengawasi penggunaan dana pembangunan pasar ikan dan beberapa kali menggelar dialog terbuka dengan DPRD.

Catatan: kasus ini disusun sebagai ilustrasi pembelajaran dan tidak merujuk pada daerah tertentu.

Pertanyaan analisis:

1. Jelaskan kasus ini menggunakan masing-masing dari keempat pendekatan. Fakta apa yang paling disorot oleh setiap pendekatan?
2. Pendekatan mana yang menurut Anda paling menerangkan kasus ini? Berikan justifikasi.
3. Bagaimana peran forum lintas agama dan asosiasi pedagang dapat dijelaskan dengan konsep modal sosial?

3.6 Aktivitas Pembelajaran

Minggu 3 — Debat teori terstruktur

Luring (kelas)

- Kelas dibagi menjadi empat kelompok; setiap kelompok membela satu pendekatan teori dan memperdebatkan relevansinya untuk kasus KTI.
- Kelompok menggunakan bukti dari pustaka dan dari peta aktor Minggu 2.
- Setelah debat, setiap kelompok merevisi matriks perbandingan dan menambahkan paragraf justifikasi.

Daring (LMS)

- Lengkapi matriks perbandingan teori yang sebagian telah diisi dosen, berdasarkan bacaan wajib.

- Tonton rekaman kuliah singkat tentang empat pendekatan beserta contoh kasus Indonesia.
- Unggah draf matriks ke forum LMS sebelum sesi luring.

Luaran: Tabel perbandingan empat pendekatan dan paragraf justifikasi 250–300 kata.

Minggu 4 — Pembahasan kasus dan esai analitis

Luring (kelas)

- Tiga hingga empat mahasiswa yang dipilih acak memaparkan argumen utama esai (3 menit per orang) dan menerima masukan kelas.
- Dosen menyintesis diskusi dan menegaskan standar analisis yang menjadi acuan penilaian esai.

Daring (LMS)

- Pelajari panduan penulisan esai analitis dan rubrik penilaiannya di LMS.
- Cari data pendukung dari portal pemerintah daerah atau situs KPU, lalu susun draf esai.

Luaran: Esai analitis individual 600–800 kata yang menganalisis satu kasus KTI dengan dua kerangka teori.

3.7 Rangkuman

- Teori berfungsi sebagai kacamata analisis yang menentukan pertanyaan, data, dan tafsiran.
- Pluralisme melihat kekuasaan tersebar di antara kelompok yang bersaing; elitisme dan pendekatan oligarki melihat kekuasaan terkonsentrasi pada elite.
- Neo-institusionalisme menekankan aturan main formal dan informal; pendekatan patron-klien menekankan pertukaran timbal balik yang tidak setara.
- Modal sosial, terutama yang bersifat menjembatani, memperkuat kapasitas demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
- Pemilihan teori didasarkan pada pertanyaan analisis dan data; kombinasi pendekatan sering memberi penjelasan paling utuh.

3.8 Latihan

Kerjakan latihan berikut secara mandiri. Bagian A terdiri atas 5 soal pilihan ganda (skor 10 per soal); Bagian B terdiri atas 2 soal uraian (skor 25 per soal). Skor maksimum 100.

A. Pilihan Ganda

1. Pendekatan yang berasumsi bahwa kekuasaan tersebar di antara banyak kelompok yang bersaing adalah ...
 - A. elitisme
 - B. pluralisme
 - C. patron-klien
 - D. oligarki

2. Argumen bahwa elite Orde Baru melakukan reorganisasi dan memanfaatkan lembaga demokrasi pascareformasi dikemukakan oleh ...
 - A. Putnam
 - B. Scott
 - C. Robison dan Hadiz
 - D. March dan Olsen
3. Analisis tentang bagaimana ambang batas pencalonan mendorong terbentuknya koalisi partai paling dekat dengan pendekatan ...
 - A. neo-institusionalisme
 - B. patron-klien
 - C. pluralisme
 - D. modal sosial
4. Ciri utama relasi patron-klien menurut Scott adalah ...
 - A. hubungan setara antara dua pihak
 - B. pertukaran timbal balik antara pihak yang tidak setara
 - C. kompetisi terbuka antarkelompok
 - D. kepatuhan pada aturan formal
5. Asosiasi warga lintas suku dan agama yang mengawasi anggaran daerah merupakan contoh modal sosial ...
 - A. bonding
 - B. bridging
 - C. patronase
 - D. oligarkis

B. Uraian

1. Bandingkan pendekatan pluralisme dan elitisme dalam menjelaskan hasil pilkada di satu kabupaten/kota di KTI. Pendekatan mana yang lebih meyakinkan menurut Anda, dan mengapa?
2. Jelaskan bagaimana modal sosial dapat memperkuat atau justru melemahkan demokrasi lokal. Gunakan konsep bonding dan bridging.

3.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 3.2 Kunci jawaban pilihan ganda

No.	Kunci	Pembahasan singkat
1	B	Pluralisme memandang kekuasaan tersebar dan keputusan lahir dari kompetisi antarkelompok.
2	C	Robison dan Hadiz (2004) serta Hadiz (2010) mengembangkan argumen reorganisasi kekuasaan oligarki.
3	A	Ambang batas pencalonan adalah aturan main formal; dampaknya terhadap perilaku aktor menjadi fokus neo-institusionalisme.
4	B	Relasi patron-klien adalah pertukaran personal dan timbal balik antara patron yang lebih kuat dan klien.
5	B	Modal sosial bridging menghubungkan kelompok yang berbeda dan memperkuat kontrol publik.

Pedoman soal uraian nomor 1

- Asumsi dan unit analisis kedua pendekatan dijelaskan dengan tepat (skor maksimal 8).
- Penerapan pada kasus konkret, bukan sekadar definisi (skor maksimal 10).
- Posisi dan justifikasi jelas serta didukung bukti (skor maksimal 7).

Pedoman soal uraian nomor 2

- Definisi modal sosial dan kedua jenisnya tepat (skor maksimal 8).
- Mekanisme penguatan dan pelemahan dijelaskan, termasuk kaitan bonding dengan patronase (skor maksimal 10).
- Contoh relevan dan argumen runtut (skor maksimal 7).

3.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada Subbab 1.8. Jika tingkat penguasaan Anda **70% atau lebih**, lanjutkan ke unit berikutnya. Jika kurang dari 70%, lakukan remedial berikut sebelum melanjutkan.

Kondisi	Tindak lanjut
< 70% (remedial)	Susun ulang Tabel 3.1 dengan kata-kata Anda sendiri dan tambahkan satu contoh kasus Indonesia untuk setiap pendekatan, lalu kerjakan kembali soal yang salah.
≥ 90% (pengayaan)	Baca satu bab dari Hadiz (2010) dan tulis ulasan 400 kata tentang bagaimana argumennya dapat diuji pada daerah di Sulawesi.

3.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

Refleksi diri

1. Pendekatan teori mana yang paling sesuai dengan cara Anda memandang politik selama ini? Apakah pandangan itu berubah?
2. Argumen lawan debat mana yang paling memengaruhi pemikiran Anda?
3. Apa yang Anda lakukan untuk memastikan esai Anda bebas plagiasi?

NILAI ICHSA-N

Integrity dan Adaptability: berani merevisi posisi awal ketika dihadapkan pada argumen dan bukti yang lebih kuat, serta mengutip gagasan orang lain secara jujur.

3.12 Referensi Unit

- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. RoutledgeCurzon.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford University Press.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Mietzner, M. (2013). *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. NUS Press.

Hikam, M. A. S. (1999). *Demokrasi dan Civil Society*. LP3ES.

Mahfud MD, M. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.

Scott, J. C. (1972). Patron-client politics and political change in Southeast Asia. *American Political Science Review*, 66(1), 91–113. (bacaan pengayaan)

March, J. G., & Olsen, J. P. (1989). *Rediscovering Institutions*. Free Press. (bacaan pengayaan)

North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press. (bacaan pengayaan)

BAB IV · UNIT 3 · MINGGU 5–6

Relasi Kekuasaan, Patronase, dan Konflik Elite

Sumber daya kekuasaan, klientelisme, koalisi, konflik elite, dan teknik pemetaan aktor

4.1 Capaian Pembelajaran Unit

Sub-CPMK3

Menganalisis pola relasi kekuasaan dan peta aktor politik lokal — mencakup koalisi, patronase, dan konflik elite — berdasarkan data empiris dari satu kabupaten/kota di wilayah Sulawesi.

Indikator capaian — mahasiswa mampu:

- Mengidentifikasi aktor utama (eksekutif, legislatif, pengusaha, tokoh adat) beserta posisi dan kepentingannya dalam satu kabupaten/kota di Sulawesi berdasarkan data empiris.
- Menguraikan pola patronase dan relasi patron-klien dalam sistem politik lokal kabupaten/kota yang dipilih menggunakan kerangka teori yang relevan.
- Membedakan tipe koalisi elite daerah (programatik dan transaksional) berdasarkan bukti empiris.
- Menganalisis sumber daya kekuasaan yang digunakan aktor untuk mempertahankan dominasi atau membangun jaringan patronase.
- Menghubungkan temuan empiris lokal dengan konsep oligarki dan reorganisasi kekuasaan pasca-Orde Baru.

CPMK	CPL yang didukung	Bobot Sub-CPMK	Estimasi Waktu
CPMK-2	CPL-05	14%	2 minggu (1.020 menit)

4.2 Pemantik

Mari memulai

Seorang kepala desa di sebuah kabupaten berkata: "Kalau bupati menang, jalan ke kampung kami diaspal. Kalau kalah, kami menunggu lima tahun lagi." Pernyataan ini mungkin terdengar biasa, tetapi di baliknya tersimpan pola relasi kekuasaan yang kompleks.

Siapa patron dan siapa klien dalam pernyataan tersebut? Apa yang dipertukarkan? Apakah pembangunan jalan seharusnya bergantung pada hasil pilkada?

4.3 Peta Konsep



Gambar 4.1 Peta konsep Unit 3

4.4 Uraian Materi

4.4.1 Sumber Daya Kekuasaan Aktor Lokal

Kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi keputusan dan perilaku pihak lain. Kemampuan ini bertumpu pada **sumber daya kekuasaan** yang dimiliki aktor. Semakin beragam sumber daya yang dikuasai seorang aktor, semakin kuat dan tahan lama posisinya.

Tabel 4.1 Jenis sumber daya kekuasaan

Sumber daya	Wujud di tingkat lokal	Indikator yang dapat ditelusuri
Ekonomi	Modal usaha, kepemilikan lahan, perusahaan kontraktor	LHKPN, data pemenang tender, profil perusahaan
Jabatan	Kewenangan kepala daerah, pimpinan DPRD, pejabat birokrasi	SK pengangkatan, struktur organisasi, APBD
Jaringan sosial	Kekerabatan, marga, alumni, organisasi	Silsilah, kepengurusan organisasi, pemberitaan
Legitimasi kultural	Status adat, keagamaan, atau keturunan tokoh	Gelar adat, jabatan di lembaga adat atau keagamaan
Informasi dan media	Kepemilikan atau kedekatan dengan media lokal	Kepemilikan media, pola pemberitaan
Koersi	Kedekatan dengan aparat, kelompok massa	Laporan pengawasan, pemberitaan konflik

4.4.2 Patronase dan Klientelisme

Patronase adalah pembagian sumber daya publik atau pribadi kepada pendukung sebagai imbalan atas dukungan politik. **Klientelisme** adalah pola relasi yang memungkinkan pertukaran itu berlangsung secara berulang melalui jaringan patron, perantara (broker), dan klien. Dalam politik lokal Indonesia, bentuknya antara lain:

- **Pembelian suara:** pemberian uang atau barang menjelang pemungutan suara.
- **Politik gentong babi (pork barrel):** pengarahannya proyek atau bantuan ke wilayah pendukung.
- **Patronase jabatan:** pengangkatan, mutasi, atau promosi ASN berdasarkan loyalitas politik, bukan merit.
- **Patronase proyek:** pengaturan pengadaan barang/jasa untuk kontraktor yang mendanai kampanye.

Perantara memegang peran kunci. Tim sukses, kepala desa, tokoh masyarakat, dan pengurus organisasi bertindak sebagai broker yang menghubungkan kandidat dengan pemilih. Karena broker memiliki kepentingan sendiri, jaringan patronase sering tidak efisien dan penuh "kebocoran". Praktik-praktik ini berkaitan erat dengan korupsi; pemetaan patronase karenanya juga merupakan bagian dari upaya antikorupsi.

4.4.3 Oligarki Lokal dan Reorganisasi Kekuasaan

Robison dan Hadiz (2004) serta Hadiz (2010) menjelaskan bahwa pascareformasi, jaringan kepentingan yang tumbuh pada masa Orde Baru, yaitu birokrat, pengusaha yang dekat dengan negara, dan tokoh partai, menata ulang posisinya di tingkat daerah. Mereka memanfaatkan pilkada, partai, dan DPRD untuk menguasai anggaran dan perizinan. Mietzner (2013) menambahkan bahwa tingginya biaya politik membuat partai dan kandidat sangat bergantung pada penyandang dana, sehingga membuka ruang bagi pengaruh pemodal.

Dalam analisis Anda, konsep oligarki membantu menjawab pertanyaan: apakah aktor-aktor yang berkuasa saat ini merupakan wajah baru, atau kelanjutan jaringan lama dengan kendaraan politik yang berbeda?

4.4.4 Koalisi Elite: Programatik dan Transaksional

Koalisi terbentuk karena tidak ada aktor yang cukup kuat untuk menang sendirian. Dalam pilkada, UU 10/2016 mensyaratkan partai atau gabungan partai memperoleh paling sedikit 20% kursi DPRD atau 25% suara sah untuk dapat mengusung pasangan calon, sehingga koalisi antarpolisi menjadi keniscayaan.

Tabel 4.2 Tipe koalisi elite daerah

Aspek	Koalisi programatik	Koalisi transaksional
Dasar pembentukan	Kesamaan visi, program, atau ideologi	Pembagian jabatan, proyek, atau dana
Bukti empiris	Dokumen visi-misi bersama, kontrak politik terbuka	Pembagian kursi pimpinan atau jabatan, pola pemenang proyek
Stabilitas	Relatif stabil selama program disepakati	Rapuh; mudah pecah jika pembagian dianggap tidak adil
Dampak pada kebijakan	Kebijakan lebih konsisten	Kebijakan mengikuti kepentingan mitra koalisi

Dalam praktik, sebagian besar koalisi di daerah bersifat campuran. Tugas analisis adalah menemukan bukti yang menunjukkan kecenderungan dominannya, bukan sekadar memberi label.

4.4.5 Konflik Elite Lokal

Konflik elite muncul ketika aktor-aktor berkuasa berebut posisi dan sumber daya. Beberapa pola yang sering dijumpai di daerah adalah: konflik **eksekutif-legislatif** dalam pembahasan APBD atau pengangkatan pejabat; **pecah kongsi** kepala daerah dan wakilnya menjelang pilkada berikutnya; konflik yang berakar pada **pemekaran** atau batas wilayah; serta perebutan akses atas **sumber daya alam**, seperti izin tambang atau perkebunan.

Untuk menganalisis konflik, telusuri tiga tahap: **akar** (kepentingan apa yang bertabrakan), **eskalasi** (peristiwa apa yang memperuncing konflik dan siapa yang dimobilisasi), dan **resolusi** (bagaimana

konflik diredam: kompromi, intervensi pusat, putusan pengadilan, atau pergantian aktor). Modal sosial yang menjembatani, seperti forum lintas kelompok, sering berperan meredam konflik.

4.4.6 Teknik Pemetaan Aktor

Pemetaan aktor dilakukan melalui langkah-langkah berikut.

1. Tentukan isu atau arena yang dianalisis, misalnya pilkada, pembahasan APBD, atau perizinan tambang.
2. Daftar semua aktor yang terlibat, lalu kelompokkan menurut kategori pada Tabel 2.3.
3. Identifikasi kepentingan, posisi (mendukung, menolak, netral), dan sumber daya setiap aktor.
4. Petakan relasi antar-aktor: aliansi, patronase, konflik, atau netral.
5. Tempatkan aktor pada matriks pengaruh-kepentingan dan gambarkan sosiogram relasinya.
6. Verifikasi setiap klaim dengan minimal dua sumber data.

Tabel 4.3 Format lembar kerja tabel aktor

Aktor	Kategori	Kepentingan	Sumber daya	Posisi	Relasi utama	Sumber data
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...

Tabel 4.4 Sumber data terbuka untuk pemetaan aktor

Sumber	Data yang dapat diperoleh
Situs KPU dan KPU daerah	Pasangan calon, partai pengusung, hasil perolehan suara
e-LHKPN KPK	Laporan harta kekayaan penyelenggara negara
Situs pemerintah daerah dan DPRD	Struktur organisasi, APBD, perda, risalah rapat
LPSE daerah	Pemenang tender pengadaan barang/jasa
Direktori Putusan Mahkamah Agung	Putusan perkara, termasuk tindak pidana korupsi
Media daerah terverifikasi	Kronologi peristiwa, pernyataan aktor

Etika pemetaan

Peta aktor bukan tuduhan. Tulis temuan secara faktual, sebutkan sumbernya, hindari data pribadi yang tidak relevan, dan junjung asas praduga tak bersalah. Dugaan yang belum terbukti harus ditulis sebagai dugaan, lengkap dengan sumbernya.

4.5 Studi Kasus

Kabupaten Lembah Damai (kasus ilustrasi)

Pada pilkada sebelumnya, pasangan bupati dan wakil bupati Lembah Damai diusung koalisi lima partai. Dua tahun kemudian, hubungan keduanya memburuk setelah pengisian jabatan kepala dinas pekerjaan umum. Wakil bupati menilai pembagian jabatan tidak sesuai kesepakatan awal. Dua partai pengusung mulai mendekati wakil bupati sebagai calon kepala daerah periode berikutnya.

Dalam pembahasan APBD, fraksi-fraksi yang dekat dengan wakil bupati menunda persetujuan anggaran proyek jalan. Seorang pengusaha kontraktor, yang juga ketua organisasi kekerabatan terbesar di kabupaten itu, diketahui memenangkan sebagian besar tender jalan dalam dua tahun terakhir.

Catatan: kasus ini disusun sebagai ilustrasi pembelajaran dan tidak merujuk pada daerah tertentu.

Pertanyaan analisis:

1. Susun tabel aktor untuk kasus ini menggunakan format Tabel 4.3.
2. Apakah koalisi pengusung bupati cenderung programatik atau transaksional? Tunjukkan buktinya.
3. Analisis akar dan eskalasi konflik elite dalam kasus ini.
4. Bagaimana posisi pengusaha kontraktor dapat dijelaskan dengan pendekatan patron-klien dan oligarki?

4.6 Aktivitas Pembelajaran

Minggu 5 — Pengumpulan data dan lembar kerja peta aktor

Luring (kelas)

- Dosen memfasilitasi diskusi pleno 30 menit untuk mengklarifikasi konsep patronase dan koalisi elite.
- Kelompok mempresentasikan temuan awal peta aktor kabupaten/kota Sulawesi pilihan masing-masing kepada kelompok lain, lalu mengidentifikasi celah data.
- Dosen memberi umpan balik langsung pada draf lembar kerja setiap kelompok.

Daring (LMS)

- Tonton video kuliah (15–20 menit) tentang relasi kekuasaan, patronase, dan tipologi koalisi elite.
- Kumpulkan data awal dari portal berita daerah, data KPU, dan dokumen DPRD sesuai Tabel 4.4.
- Isi lembar kerja pra-diskusi dan unggah ke LMS sebelum sesi luring.

Luaran: Lembar kerja peta aktor sementara (tabel dan narasi maksimal 500 kata) dengan minimal lima aktor, sumber daya, dan relasi patronase.

Minggu 6 — Presentasi peta relasi kekuasaan

Luring (kelas)

- Setiap kelompok mempresentasikan analisis peta aktor final: pola koalisi, patronase, dan konflik elite.
- Kelompok merespons pertanyaan kritis dan mencatat persamaan serta perbedaan pola kekuasaan antardaerah.
- Dosen mengonsolidasikan temuan kelas menjadi gambaran umum peta kekuasaan politik lokal Sulawesi; tes tertulis dilaksanakan di akhir sesi.

Daring (LMS)

- Sempurnakan draf peta aktor berdasarkan umpan balik Minggu 5 dan lengkapi data konflik serta koalisi.
- Pelajari rubrik presentasi dan siapkan salindia presentasi kelompok.

Luaran: Presentasi kelompok peta relasi kekuasaan dan salindia pendukungnya.

4.7 Rangkuman

- Kekuasaan aktor lokal bertumpu pada sumber daya ekonomi, jabatan, jaringan sosial, legitimasi kultural, informasi, dan koersi.

- Patronase dan klientelisme berlangsung melalui jaringan patron, broker, dan klien dalam bentuk pembelian suara, proyek, bantuan, dan jabatan.
- Pendekatan oligarki membantu menilai apakah elite lokal merupakan wajah baru atau kelanjutan jaringan lama.
- Koalisi elite dapat bersifat programatik atau transaksional; tipe dominannya harus dibuktikan dengan data.
- Konflik elite dianalisis melalui akar, eskalasi, dan resolusi; pemetaan aktor dilakukan secara sistematis, terverifikasi, dan beretika.

4.8 Latihan

Kerjakan latihan berikut secara mandiri. Bagian A terdiri atas 5 soal pilihan ganda (skor 10 per soal); Bagian B terdiri atas 2 soal uraian (skor 25 per soal). Skor maksimum 100.

A. Pilihan Ganda

1. Pengangkatan kepala dinas berdasarkan loyalitas kepada kepala daerah, bukan berdasarkan kompetensi, merupakan contoh ...
 - A. koalisi programatik
 - B. patronase jabatan
 - C. modal sosial bridging
 - D. desentralisasi fiskal
2. Dalam jaringan klientelisme, kepala desa yang menghubungkan kandidat dengan pemilih berperan sebagai ...
 - A. patron
 - B. klien
 - C. broker
 - D. oligark
3. Bukti yang **paling kuat** bahwa sebuah koalisi bersifat transaksional adalah ...
 - A. koalisi terdiri atas banyak partai
 - B. pembagian jabatan dan proyek mengikuti komposisi partai pengusung
 - C. calon berasal dari keluarga pengusaha
 - D. koalisi memenangkan pilkada
4. Menurut UU 10/2016, partai atau gabungan partai dapat mengusung pasangan calon kepala daerah jika memperoleh paling sedikit ...
 - A. 10% kursi DPRD atau 15% suara sah
 - B. 15% kursi DPRD atau 20% suara sah
 - C. 20% kursi DPRD atau 25% suara sah
 - D. 25% kursi DPRD atau 30% suara sah
5. Sumber data yang paling tepat untuk menelusuri pemenang tender proyek pemerintah daerah adalah ...
 - A. e-LHKPN
 - B. LPSE daerah
 - C. Direktori Putusan MA
 - D. situs KPU

B. Uraian

1. Pilih satu kabupaten/kota di Sulawesi. Identifikasi tiga aktor utamanya, sumber daya kekuasaan masing-masing, dan relasi di antara mereka. Sebutkan sumber data yang Anda gunakan.
2. Jelaskan mengapa koalisi transaksional cenderung rapuh dan bagaimana kerapuhan itu dapat memicu konflik elite. Berikan ilustrasi.

4.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 4.5 Kunci jawaban pilihan ganda

No.	Kunci	Pembahasan singkat
1	B	Pembagian jabatan sebagai imbalan loyalitas politik adalah patronase jabatan.
2	C	Broker adalah perantara yang menghubungkan patron dengan klien.
3	B	Koalisi transaksional ditandai pembagian jabatan atau proyek sebagai dasar kerja sama.
4	C	UU 10/2016 menetapkan ambang batas 20% kursi DPRD atau 25% suara sah.
5	B	LPSE memuat informasi pengadaan barang/jasa, termasuk pemenang tender.

Pedoman soal uraian nomor 1

- Tiga aktor relevan beserta kategori dan kepentingannya (skor maksimal 8).
- Sumber daya kekuasaan dan relasi dianalisis dengan konsep yang tepat (skor maksimal 10).
- Sumber data jelas, dapat ditelusuri, dan ditulis secara etis (skor maksimal 7).

Pedoman soal uraian nomor 2

- Ciri koalisi transaksional dijelaskan dengan tepat (skor maksimal 8).
- Mekanisme kerapuhan hingga konflik (akar dan eskalasi) diuraikan logis (skor maksimal 10).
- Ilustrasi relevan dan argumen didukung rujukan (skor maksimal 7).

4.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada Subbab 1.8. Jika tingkat penguasaan Anda **70% atau lebih**, lanjutkan ke unit berikutnya. Jika kurang dari 70%, lakukan remedial berikut sebelum melanjutkan.

Kondisi	Tindak lanjut
< 70% (remedial)	Kerjakan ulang pertanyaan studi kasus Lembah Damai nomor 1 dan 2 dengan mengikuti langkah pemetaan pada Subbab 4.4.6, lalu kerjakan kembali soal yang salah.
≥ 90% (pengayaan)	Gambarkan sosiogram relasi aktor untuk daerah kajian kelompok Anda menggunakan aplikasi diagram, lalu jelaskan tiga temuan utamanya dalam 300 kata.

4.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

Refleksi diri

1. Temuan apa dalam pemetaan aktor yang paling mengejutkan Anda?

2. Bagaimana Anda menjaga keseimbangan antara ketajaman analisis dan asas praduga tak bersalah?
3. Bagaimana kontribusi Anda dalam kerja kelompok minggu ini?

NILAI ICHSA-N

Harmony dan Integrity: mendengarkan dan merespons pendapat sejawat secara kritis dan santun, serta menyajikan temuan tentang aktor secara faktual, adil, dan bersumber jelas.

4.12 Referensi Unit

- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. RoutledgeCurzon.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford University Press.
- Mietzner, M. (2013). *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. NUS Press.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Kajian Sistem Integritas Pemerintah Daerah*. KPK RI.

BAB V · UNIT 4 · MINGGU 7

Laporan Analisis Aktor-Arena

Menyusun laporan akademis berbasis data sebagai kulminasi kajian pra-UTS

5.1 Capaian Pembelajaran Unit

Sub-CPMK4

Menyusun laporan analisis aktor-arena yang terstruktur dan berbasis data atas satu kasus empiris politik lokal di Kawasan Timur Indonesia sebagai kulminasi kajian pra-UTS.

Indikator capaian — mahasiswa mampu:

- Menyusun laporan analisis aktor-arena yang terstruktur secara akademis, mencakup latar belakang, kerangka analisis, temuan empiris, dan kesimpulan.
- Mengintegrasikan konsep Minggu 1–6 (desentralisasi, aktor-arena, patronase, koalisi, konflik elite) ke dalam satu narasi analitis yang koheren.
- Memvalidasi argumen dengan mengutip minimal tiga sumber pustaka yang relevan serta data empiris yang dapat ditelusuri.
- Mengevaluasi keterbatasan data dan analisis secara reflektif serta mengidentifikasi pertanyaan riset lanjutan.
- Menyajikan laporan dalam sistematika penulisan akademis ilmu politik dengan bahasa Indonesia baku dan rujukan yang konsisten.

CPMK	CPL yang didukung	Bobot Sub-CPMK	Estimasi Waktu
CPMK-2	CPL-05	7%	1 minggu (510 menit)

5.2 Pemantik

Mari memulai

Anda telah memiliki peta aktor, esai teori, dan presentasi peta kuasa. Namun, seorang pejabat daerah yang membaca hasil kerja Anda bertanya: "Apa temuan terpenting Anda, dan mengapa saya harus memercayainya?"

Jika Anda hanya boleh menjawab dalam tiga kalimat, apa jawaban Anda? Tuliskan sekarang. Tiga kalimat itu adalah benih argumen utama laporan Anda.

5.3 Peta Konsep



Gambar 5.1 Peta konsep Unit 4

5.4 Uraian Materi

5.4.1 Karakteristik Laporan Analisis Politik

Laporan analisis aktor-arena bukan kumpulan berita, melainkan **argumen** yang didukung **bukti** dan dijelaskan dengan **teori**. Laporan yang baik memiliki satu pertanyaan analisis yang jelas, jawaban utama yang tegas, dan alur yang menuntun pembaca dari data menuju kesimpulan. Laporan pada unit ini disusun **secara individual** oleh setiap mahasiswa, dengan memanfaatkan data kelompok yang telah dikumpulkan sejak Minggu 1.

5.4.2 Sistematika Laporan

Tabel 5.1 Sistematika laporan analisis aktor-arena (maksimal 2.000 kata)

Bagian	Isi	Porsi
1. Pendahuluan	Latar belakang kasus, alasan pemilihan daerah, pertanyaan analisis, dan argumen utama.	± 15%
2. Kerangka analisis	Konsep dan teori yang digunakan (minimal dua pendekatan) serta alasan pemilihannya.	± 20%
3. Temuan empiris	Peta aktor, sumber daya dan relasi kekuasaan, pola patronase, koalisi, dan konflik elite; minimal satu tabel atau diagram.	± 35%
4. Diskusi kritis	Tafsir temuan dengan teori, perbandingan dengan literatur, keterbatasan data dan analisis.	± 20%
5. Kesimpulan	Jawaban atas pertanyaan analisis dan pertanyaan riset lanjutan.	± 10%
Daftar pustaka dan lampiran	Minimal tiga sumber pustaka mata kuliah dan data yang dapat ditelusuri (tidak dihitung dalam batas kata).	—

5.4.3 Menulis Setiap Bagian

Pendahuluan. Mulailah dari fenomena yang konkret, lalu kerucutkan menjadi pertanyaan analisis. Akhiri pendahuluan dengan argumen utama. Contoh: *"Laporan ini berargumen bahwa dominasi kelompok kontraktor dalam politik Kabupaten X bertahan karena koalisi pengusung bupati dibangun di atas pembagian proyek, bukan kesamaan program."*

Kerangka analisis. Jelaskan konsep secara ringkas dan operasional: apa yang Anda maksud dengan patronase, koalisi transaksional, atau oligarki, serta indikator apa yang Anda cari dalam data. Hindari menyalin definisi panjang tanpa menghubungkannya dengan kasus.

Temuan empiris. Sajikan data secara sistematis. Gunakan tabel aktor atau sosiogram untuk meringkas informasi, lalu jelaskan pola terpenting dalam narasi. Setiap klaim faktual harus disertai sumber.

Diskusi kritis. Di sinilah analisis Anda diuji. Jelaskan mengapa pola itu terjadi dengan bantuan teori, bandingkan dengan temuan penulis lain, dan akui keterbatasan data. Tanyakan pada diri sendiri: adakah penjelasan alternatif?

Kesimpulan. Jawab pertanyaan analisis secara langsung tanpa menambah data baru. Tutup dengan satu atau dua pertanyaan riset lanjutan yang dapat dikembangkan menjadi isu advokasi pada Unit 5.

5.4.4 Data, Keterlacakan, dan Triangulasi

Data yang baik adalah data yang **dapat ditelusuri** oleh pembaca lain. Utamakan dokumen resmi (KPU, APBD, perda, LHKPN, LPSE, putusan pengadilan), lalu lengkapi dengan pemberitaan media terverifikasi. Lakukan **triangulasi**: sebuah klaim penting sebaiknya didukung minimal dua sumber yang independen. Catat seluruh sumber dalam tabel sumber data seperti contoh berikut.

Tabel 5.2 Contoh tabel sumber data

Klaim	Sumber 1	Sumber 2	Tanggal akses
Partai pengusung pasangan calon	Situs KPU kabupaten	Berita media daerah	...
Perusahaan pemenang tender jalan	LPSE kabupaten	Laporan media	...

5.4.5 Sitasi, Orisinalitas, dan Etika

Gunakan satu gaya sitasi secara konsisten, yaitu format penulis-tahun, misalnya (Hadiz, 2010) atau Robison dan Hadiz (2004). Setiap kutipan langsung dan parafrasa wajib disertai sumber. Jika Anda memanfaatkan GenAI, ikuti ketentuan pada Petunjuk Penggunaan Modul bagian C dan cantumkan pernyataan penggunaannya. Tulis temuan tentang individu secara faktual dan adil; dugaan pelanggaran harus disebut sebagai dugaan beserta sumbernya.

5.4.6 Menjembatani ke Paruh Kedua Semester

Laporan ini menjadi fondasi proyek pasca-UTS. Keterbatasan dan pertanyaan riset lanjutan yang Anda tulis akan dipakai kelompok untuk memilih **isu politik lokal yang urgen** pada Unit 5, lalu dikembangkan menjadi strategi advokasi dan *policy brief*.

5.5 Studi Kasus

Membandingkan dua paragraf temuan

Paragraf A: *"Di Kabupaten X banyak terjadi politik uang dan bupati dekat dengan pengusaha. Hal ini sangat merugikan masyarakat dan harus dihentikan."*

Paragraf B: *"Data LPSE Kabupaten X (diakses 12 Mei) menunjukkan bahwa 7 dari 10 paket pekerjaan jalan tahun anggaran berjalan dimenangkan dua perusahaan yang pemiliknya tercatat sebagai anggota tim pemenangan bupati dalam dokumen kampanye yang dilaporkan ke KPU. Pola ini sejalan dengan konsep patronase proyek (lihat Subbab 4.4.2), meskipun data yang tersedia belum cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum."*

Catatan: contoh ini disusun sebagai ilustrasi pembelajaran dan tidak merujuk pada daerah tertentu.

Pertanyaan analisis:

1. Apa perbedaan mendasar kedua paragraf dari segi bukti, penggunaan konsep, dan etika penulisan?
2. Tulis ulang Paragraf A menjadi paragraf temuan yang memenuhi standar laporan analisis.

5.6 Aktivitas Pembelajaran

Minggu 7 — Reviu, peer review, dan penulisan laporan

Luring (kelas)

- Dosen memfasilitasi sesi reviu (30 menit) yang merangkum kerangka analisis aktor-arena secara utuh sebagai panduan penulisan laporan.
- Mahasiswa melakukan *peer review* terstruktur atas kerangka laporan sejawat menggunakan daftar periksa pada Tabel 5.3.
- Mahasiswa merevisi kerangka laporan berdasarkan umpan balik sebelum menulis draf akhir.

Daring (LMS)

- Unduh templat laporan dan rubrik penilaian di LMS.
- Susun tabel sumber data dan lengkapi data yang masih kurang dari sumber terbuka.
- Unggah laporan akhir ke LMS sesuai tenggat.

Luaran: Laporan analisis aktor-arena individual maksimal 2.000 kata dengan minimal satu tabel atau diagram peta aktor.

5.7 Rangkuman

- Laporan analisis aktor-arena adalah argumen yang didukung bukti dan dijelaskan dengan teori, bukan kumpulan berita.
- Sistematika laporan meliputi pendahuluan, kerangka analisis, temuan empiris, diskusi kritis, dan kesimpulan, dengan batas 2.000 kata.
- Data harus dapat ditelusuri dan ditriangulasi; setiap klaim faktual disertai sumber.
- Sitasi yang konsisten, orisinalitas, dan penulisan yang adil terhadap aktor merupakan bagian dari mutu laporan.
- Keterbatasan dan pertanyaan riset lanjutan menjadi jembatan menuju isu advokasi pada paruh kedua semester.

5.8 Latihan: Swa-Nilai Draft Laporan

Sebelum mengumpulkan laporan, nilai draf Anda sendiri menggunakan daftar periksa berikut. Beri skor 0 (belum ada), 1 (ada tetapi lemah), atau 2 (sudah baik) untuk setiap butir. Skor maksimum 20.

Tabel 5.3 Daftar periksa swa-nilai dan peer review

No.	Butir periksa	Skor (0–2)
1	Pertanyaan analisis dan argumen utama dinyatakan jelas di pendahuluan.	
2	Minimal dua pendekatan teori dijelaskan dan dioperasionalkan.	
3	Peta aktor mencakup minimal lima aktor beserta kepentingan dan sumber dayanya.	
4	Pola patronase, koalisi, atau konflik elite dianalisis, bukan sekadar dideskripsikan.	

No.	Butir pemeriksaan	Skor (0–2)
5	Setiap klaim faktual disertai sumber yang dapat ditelusuri.	
6	Klaim penting ditriangulasi dengan minimal dua sumber.	
7	Minimal tiga sumber pustaka mata kuliah dirujuk.	
8	Keterbatasan data dan pertanyaan riset lanjutan dinyatakan.	
9	Minimal satu tabel atau diagram disajikan dan dijelaskan.	
10	Bahasa baku, sitasi konsisten, dan panjang tidak melebihi 2.000 kata.	
	Jumlah	

Tingkat penguasaan = $(\text{jumlah skor} \div 20) \times 100\%$. Butir yang masih bernilai 0 atau 1 wajib diperbaiki sebelum laporan dikumpulkan.

5.9 Rubrik Penilaian Laporan

Laporan dinilai dosen menggunakan rubrik berikut (bobot aspek mengikuti RPS).

Tabel 5.4 Rubrik laporan analisis aktor-arena

Aspek (bobot)	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
Kelengkapan dan kedalaman analisis aktor-arena (35%)	Aktor, sumber daya, dan relasi lengkap; pola dianalisis mendalam	Lengkap; analisis cukup mendalam	Sebagian aktor atau relasi terlewat; analisis dangkal	Deskriptif, tidak menganalisis
Koherensi penggunaan kerangka teoretis (30%)	Teori dioperasionalkan dan menjelaskan temuan secara koheren	Teori digunakan dengan tepat, sebagian kurang terhubung	Teori disebut tetapi kurang diterapkan	Tanpa kerangka teori
Kualitas dan keterlacakan data (25%)	Data resmi, ditriangulasi, seluruh sumber jelas	Sebagian besar sumber jelas	Sumber terbatas atau kurang jelas	Tanpa sumber atau tidak dapat ditelusuri
Sistematika dan kejelasan penulisan (10%)	Runtut, bahasa baku, sitasi konsisten	Runtut dengan sedikit kesalahan	Kurang runtut, sitasi tidak konsisten	Tidak sistematis

Persiapan UTS (Minggu 8)

UTS mencakup Sub-CPMK1 sampai Sub-CPMK4. Pelajari kembali rangkuman Unit 1–4, kerjakan ulang latihan yang belum tuntas, dan bawa pemahaman tentang kasus kelompok Anda karena soal UTS akan meminta penerapan konsep pada kasus empiris. Kisi-kisi UTS disajikan pada bagian asesmen sumatif modul ini.

5.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada Subbab 1.8. Jika tingkat penguasaan Anda **70% atau lebih**, lanjutkan ke unit berikutnya. Jika kurang dari 70%, lakukan remedial berikut sebelum melanjutkan.

Kondisi	Tindak lanjut
< 70% (remedial)	Perbaiki butir daftar Periksa yang bernilai 0 atau 1, konsultasikan draf kepada dosen melalui LMS, dan lakukan swa-nilai ulang sebelum pengumpulan.
≥ 90% (pengayaan)	Kembangkan satu pertanyaan riset lanjutan menjadi usulan isu advokasi sepanjang satu halaman sebagai bekal Unit 5.

5.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

Refleksi diri

1. Bagian laporan mana yang paling sulit Anda tulis, dan mengapa?
2. Umpan balik sejawat apa yang paling membantu memperbaiki laporan Anda?
3. Apa yang akan Anda lakukan secara berbeda pada proyek pasca-UTS?

NILAI ICHSA-N

Integrity dan Service: menulis laporan secara jujur dan orisinal, serta memberi umpan balik yang konstruktif dan menghargai kerja sejawat dalam sesi peer review.

5.12 Referensi Unit

- Hadiz, V. R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford University Press.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. RoutledgeCurzon.
- Mietzner, M. (2013). *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. NUS Press.
- Turner, M., & Hulme, D. (1997). *Governance, Administration and Development: Making the State Work*. Macmillan.

BAB VI · UNIT 5 · MINGGU 9–10

Isu Politik Lokal dan Problem Statement Berbasis Bukti

Analisis kebijakan berbasis data terbuka dan SPBE untuk merumuskan masalah advokasi

6.1 Capaian Pembelajaran Unit

Sub-CPMK5

Mengidentifikasi isu politik lokal yang urgen dan merumuskan problem statement advokasi kebijakan berbasis bukti dengan memanfaatkan data terbuka dan platform SPBE yang tersedia.

Indikator capaian — mahasiswa mampu:

- Mengidentifikasi minimal tiga isu politik lokal yang urgen di Kawasan Timur Indonesia menggunakan data dari portal data.go.id dan portal SPBE daerah.
- Memilah data terbuka yang relevan dan kredibel sebagai landasan bukti rumusan masalah kebijakan.
- Merumuskan *problem statement* advokasi secara terstruktur dengan komponen isu, bukti empiris, aktor terdampak, dan urgensi intervensi.
- Membedakan isu yang dapat ditangani melalui advokasi kebijakan daerah dari isu yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah.

CPMK	CPL yang didukung	Bobot Sub-CPMK	Estimasi Waktu
CPMK-3	CPL-07 dan CPL-09	14%	2 minggu (1.020 menit)

6.2 Pemantik

Mari memulai

Pada paruh pertama semester Anda telah memetakan siapa yang berkuasa di sebuah daerah. Sekarang pertanyaannya bergeser: masalah publik apa yang paling mendesak di daerah itu, dan siapa yang paling dirugikan jika masalah itu dibiarkan?

Tuliskan satu masalah yang menurut Anda paling penting. Lalu tanyakan: data apa yang dapat membuktikan bahwa masalah itu nyata dan mendesak, bukan sekadar keluhan?

6.3 Peta Konsep



Gambar 6.1 Peta konsep Unit 5

6.4 Uraian Materi

6.4.1 Dari Analisis Kekuasaan ke Analisis Kebijakan

Paruh kedua semester menggeser fokus dari pertanyaan "siapa berkuasa" menuju "apa yang harus diubah dan bagaimana caranya". Hasil pemetaan aktor tidak ditinggalkan; justru menjadi modal penting, karena advokasi yang efektif selalu memperhitungkan struktur kekuasaan di daerah. Langkah pertama advokasi adalah merumuskan **masalah kebijakan** secara tepat.

Masalah kebijakan adalah kesenjangan antara kondisi yang ada dan kondisi yang seharusnya, yang berdampak pada publik dan dapat diatasi melalui tindakan pemerintah. Tidak setiap keluhan adalah masalah kebijakan. Keluhan menjadi masalah kebijakan apabila dapat dibuktikan dengan data, dampaknya dirasakan kelompok masyarakat, dan terdapat lembaga publik yang berwenang menanganinya.

Alat bantu yang sederhana adalah **pohon masalah**: batang pohon adalah masalah inti, akar adalah penyebabnya, dan cabang adalah dampaknya. Pohon masalah membantu membedakan gejala dari penyebab, sehingga advokasi diarahkan pada akar masalah yang dapat diubah melalui kebijakan.

6.4.2 Data Terbuka dan SPBE sebagai Sumber Bukti

Kebijakan Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres 95/2018) mendorong pemerintah pusat dan daerah membuka data serta layanannya secara digital. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberi hak kepada warga untuk memperoleh informasi publik. Bagi analis dan pegiat advokasi, ini berarti tersedianya bukti yang dapat diakses dan ditelusuri.

Tabel 6.1 Sumber data terbuka untuk analisis isu daerah

Sumber	Jenis data	Contoh pemanfaatan
Portal Satu Data Indonesia (data.go.id) dan portal satu data daerah	Dataset sektoral kementerian dan pemerintah daerah	Tren angka putus sekolah, cakupan layanan kesehatan
BPS dan publikasi "Kabupaten/Kota dalam Angka"	Statistik kependudukan, kemiskinan, IPM	Membandingkan kinerja antar-kabupaten
Dokumen APBD, RKPD, dan LKjIP pada situs pemerintah daerah	Alokasi dan realisasi anggaran, capaian kinerja	Menilai kesenjangan anggaran dan hasil

Sumber	Jenis data	Contoh pemanfaatan
Laporan hasil pemeriksaan BPK	Opini dan temuan pemeriksaan keuangan daerah	Mengidentifikasi risiko tata kelola keuangan
Ombudsman RI dan kanal pengaduan SP4N-LAPOR!	Kepatuhan standar pelayanan dan pengaduan warga	Menunjukkan masalah pelayanan publik
KPU dan portal SPBE daerah	Data kepemiluan dan layanan digital pemerintah	Isu partisipasi politik dan layanan elektronik

Nilailah kredibilitas setiap data dengan empat pertanyaan: **siapa** penerbitnya, **kapan** data diperbarui, **bagaimana** data dikumpulkan, dan **apakah** data tersebut konsisten dengan sumber lain. Data yang tidak dapat dijawab keempat pertanyaannya sebaiknya tidak dijadikan bukti utama.

6.4.3 Memilih Isu yang Urgen dan dalam Kewenangan Daerah

Dari beberapa kandidat isu, pilih satu isu advokasi menggunakan kriteria berikut.

Tabel 6.2 Kriteria pemilihan isu advokasi

Kriteria	Pertanyaan penuntun
Urgensi	Seberapa besar dan mendesak dampaknya bagi masyarakat?
Bukti	Apakah tersedia data yang kredibel dan dapat ditelusuri?
Kewenangan	Apakah isu ini menjadi urusan pemerintah daerah menurut UU 23/2014?
Keterpecahan	Adakah solusi kebijakan yang realistis dalam waktu dan anggaran daerah?
Relevansi kajian	Apakah isu ini terkait dengan temuan peta aktor dan relasi kekuasaan kelompok?

Kriteria **kewenangan** sangat menentukan. Isu yang berada dalam urusan absolut pemerintah pusat, misalnya kebijakan moneter, tidak dapat diadvokasi kepada DPRD kabupaten. Sebaliknya, isu layanan kesehatan dasar, pendidikan dasar, atau infrastruktur jalan kabupaten berada dalam kewenangan kabupaten/kota. Jika kewenangan terbagi, tentukan tingkat pemerintahan yang paling tepat menjadi sasaran advokasi.

6.4.4 Merumuskan Problem Statement Advokasi

Problem statement adalah pernyataan ringkas dan tajam yang menjelaskan masalah, buktinya, siapa yang terdampak, dan mengapa intervensi dibutuhkan sekarang. Pernyataan ini menjadi fondasi strategi advokasi dan *policy brief*.

Tabel 6.3 Komponen problem statement

Komponen	Isi	Contoh (ilustrasi)
Isu	Masalah kebijakan yang spesifik dan terukur	Rendahnya cakupan layanan air bersih di kecamatan pesisir Kabupaten X
Bukti empiris	Data kuantitatif atau kualitatif beserta sumbernya	Cakupan layanan jauh di bawah rata-rata kabupaten menurut data dinas terkait; pengaduan warga meningkat
Aktor terdampak	Kelompok yang paling dirugikan	Rumah tangga nelayan, perempuan, dan anak di kecamatan pesisir

Komponen	Isi	Contoh (ilustrasi)
Urgensi intervensi	Alasan tindakan harus segera diambil	Pembahasan RKPD tahun depan menjadi peluang memasukkan program; risiko penyakit berbasis air meningkat
Kewenangan	Lembaga yang berwenang	Pemerintah Kabupaten X melalui dinas terkait dan DPRD Kabupaten X

Pola kalimat problem statement

"[Isu] di [lokasi] menyebabkan [dampak] bagi [aktor terdampak]. Data [sumber, tahun] menunjukkan [bukti utama]. Karena [urgensi], [lembaga berwenang] perlu segera [arah intervensi]."

6.5 Studi Kasus

Layanan dasar di Kabupaten Pulau Sejahtera (kasus ilustrasi)

Kelompok mahasiswa menemukan tiga kandidat isu di Kabupaten Pulau Sejahtera: (1) tingginya angka anak tidak melanjutkan sekolah ke SMP di pulau-pulau kecil; (2) naiknya harga BBM yang dikeluarkan nelayan; dan (3) lambatnya pelayanan administrasi kependudukan karena aplikasi layanan daring kabupaten sering tidak dapat diakses.

Data BPS kabupaten menunjukkan angka partisipasi sekolah jenjang SMP di kecamatan kepulauan lebih rendah dibanding kecamatan daratan. Portal pengaduan menunjukkan ratusan keluhan layanan kependudukan dalam satu tahun. Sementara itu, keluhan harga BBM banyak muncul di media sosial.

Catatan: kasus ini disusun sebagai ilustrasi pembelajaran dan tidak merujuk pada daerah tertentu.

Pertanyaan analisis:

1. Nilai ketiga isu menggunakan kriteria pada Tabel 6.2. Isu mana yang tidak tepat diadvokasikan kepada pemerintah kabupaten, dan mengapa?
2. Pilih satu isu yang paling layak, lalu rumuskan problem statement menggunakan pola kalimat pada Subbab 6.4.4.
3. Data tambahan apa yang Anda perlukan untuk memperkuat bukti?

6.6 Aktivitas Pembelajaran

Minggu 9 — Penelusuran data dan pemetaan isu

Luring (kelas)

- Dosen memaparkan kerangka analisis kebijakan berbasis bukti dan cara membaca data SPBE (20 menit).
- Kelompok (4–5 orang) mengakses data terbuka menggunakan laptop, mengisi lembar pemetaan isu (*problem mapping*), dan memaparkan kandidat isu kepada kelas.
- Dosen memimpin pleno perbandingan temuan antarkelompok.

Daring (LMS)

- Pelajari panduan penelusuran portal data terbuka (data.go.id, portal SPBE daerah, situs KPU) dan templat analisis isu di LMS.
- Telusuri data secara mandiri dan isi lembar kerja analisis isu secara daring.
- Unggah draf problem statement individual ke LMS.

Luaran: Draf problem statement individual 300–500 kata.

Minggu 10 — Gallery walk dan finalisasi**Luring (kelas)**

- Setiap kelompok memajang poster ringkasan problem statement; kelompok lain memberi umpan balik tertulis berkategori kekuatan, kelemahan, dan saran.
- Kelompok mengintegrasikan masukan; dosen memimpin sintesis dan menegaskan kriteria problem statement yang baik.
- Tes tertulis formatif (30 menit): merumuskan problem statement dari kasus yang disediakan dosen.

Daring (LMS)

- Beri umpan balik terstruktur kepada dua kelompok lain di forum LMS menggunakan rubrik.
- Revisi dokumen berdasarkan masukan dan lampirkan lembar jejak revisi.

Luaran: Problem statement final kelompok 500–700 kata beserta lembar jejak revisi.

6.7 Rangkuman

- Masalah kebijakan adalah kesenjangan kondisi yang berdampak publik, dapat dibuktikan dengan data, dan dapat ditangani lembaga publik yang berwenang.
- Pohon masalah membantu membedakan penyebab, masalah inti, dan dampak.
- Satu Data Indonesia, SPBE, dan keterbukaan informasi publik menyediakan sumber bukti yang harus dinilai kredibilitasnya.
- Isu advokasi dipilih berdasarkan urgensi, bukti, kewenangan, keterpecahan, dan relevansi dengan kajian.
- Problem statement memuat isu, bukti empiris, aktor terdampak, urgensi, dan lembaga yang berwenang.

6.8 Latihan

Kerjakan latihan berikut secara mandiri. Bagian A terdiri atas 5 soal pilihan ganda (skor 10 per soal); Bagian B terdiri atas 2 soal uraian (skor 25 per soal). Skor maksimum 100.

A. Pilihan Ganda

1. Suatu keluhan warga menjadi masalah kebijakan apabila ...
 - A. banyak dibicarakan di media sosial
 - B. didukung data, berdampak publik, dan ada lembaga berwenang yang dapat menanganinya
 - C. disampaikan oleh tokoh masyarakat
 - D. sudah pernah dibahas di DPRD
2. Dalam pohon masalah, akar pohon menggambarkan ...
 - A. dampak masalah
 - B. masalah inti
 - C. penyebab masalah
 - D. solusi kebijakan

3. Regulasi yang menjadi dasar kebijakan Satu Data Indonesia adalah ...
 - A. Perpres 95/2018
 - B. Perpres 39/2019
 - C. UU 14/2008
 - D. PP 96/2012
4. Isu berikut yang **paling tidak tepat** diadvokasikan kepada DPRD kabupaten adalah ...
 - A. perbaikan jalan kabupaten
 - B. layanan puskesmas
 - C. penetapan suku bunga acuan
 - D. pelayanan administrasi kependudukan
5. Komponen problem statement yang menjelaskan mengapa tindakan harus diambil sekarang adalah ...
 - A. isu
 - B. bukti empiris
 - C. aktor terdampak
 - D. urgensi intervensi

B. Uraian

1. Pilih satu isu layanan publik di kabupaten/kota kajian kelompok Anda. Uraikan pohon masalahnya (penyebab, masalah inti, dampak) dan sebutkan data yang mendukung.
2. Rumuskan problem statement advokasi untuk isu tersebut dan jelaskan mengapa lembaga yang Anda sasar memiliki kewenangan menurut UU 23/2014.

6.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 6.4 Kunci jawaban pilihan ganda

No.	Kunci	Pembahasan singkat
1	B	Masalah kebijakan memerlukan bukti, dampak publik, dan lembaga yang berwenang.
2	C	Akar menggambarkan penyebab; batang masalah inti; cabang dampak.
3	B	Satu Data Indonesia diatur dalam Perpres 39/2019; Perpres 95/2018 mengatur SPBE.
4	C	Kebijakan moneter termasuk urusan absolut pemerintah pusat.
5	D	Urgensi intervensi menjelaskan alasan waktu dan pentingnya tindakan segera.

Pedoman soal uraian nomor 1

- Pohon masalah logis dan membedakan penyebab dari dampak (skor maksimal 10).
- Data pendukung relevan, bersumber jelas, dan dinilai kredibilitasnya (skor maksimal 10).
- Isu berada dalam kewenangan daerah dan dijelaskan (skor maksimal 5).

Pedoman soal uraian nomor 2

- Kelima komponen problem statement lengkap dan tajam (skor maksimal 12).
- Analisis kewenangan tepat dan mengacu pada pembagian urusan (skor maksimal 8).
- Bahasa ringkas dan persuasif (skor maksimal 5).

6.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada Subbab 1.8. Jika tingkat penguasaan Anda **70% atau lebih**, lanjutkan ke unit berikutnya. Jika kurang dari 70%, lakukan remedial berikut sebelum melanjutkan.

Kondisi	Tindak lanjut
< 70% (remedial)	Ulangi analisis kasus Pulau Sejahtera dengan Tabel 6.2 dan 6.3, konsultasikan hasilnya di forum LMS, lalu kerjakan kembali soal yang salah.
≥ 90% (pengayaan)	Ajukan permohonan informasi publik (simulasi) kepada PPID daerah kajian untuk data yang belum tersedia, menggunakan format permohonan resmi PPID.

6.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

Refleksi diri

1. Seberapa mudah Anda menemukan data terbuka yang kredibel untuk daerah kajian? Apa hambatannya?
2. Bagaimana temuan peta aktor kelompok memengaruhi pilihan isu advokasi Anda?
3. Masukan sejawat apa yang paling mengubah problem statement kelompok?

NILAI ICHSA-N

Integrity dan Harmony: menggunakan data secara jujur tanpa memilih-milih bukti yang hanya menguntungkan argumen sendiri, serta memberi umpan balik berbasis bukti dan menghargai perbedaan perspektif dalam *gallery walk*.

6.12 Referensi Unit

- Turner, M., & Hulme, D. (1997). *Governance, Administration and Development: Making the State Work*. Macmillan.
- Azis, I. J., & Widodo, T. (2010). Decentralization, governance, and economic performance in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 11(1).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Kajian Sistem Integritas Pemerintah Daerah*. KPK RI.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (bacaan pengayaan)

BAB VII · UNIT 6 · MINGGU 11–12

Strategi Advokasi dan Komunikasi Kebijakan

Merancang advokasi berbasis bukti dan mengomunikasikannya kepada pemangku kepentingan

7.1 Capaian Pembelajaran Unit

Sub-CPMK6

Merancang strategi advokasi kebijakan yang komprehensif dan mengomunikasikannya secara efektif kepada pemangku kepentingan lintas disiplin melalui simulasi presentasi advokasi.

Indikator capaian — mahasiswa mampu:

- Merancang strategi advokasi yang memuat tujuan advokasi, target pemangku kepentingan, pesan kunci, saluran komunikasi, dan tahapan aksi berdasarkan problem statement final.
- Memetakan pemangku kepentingan dengan membedakan posisi, kepentingan, dan tingkat pengaruh setiap aktor terhadap isu yang diadvokasi.
- Memilih pendekatan advokasi yang sesuai dengan konteks politik lokal KTI, termasuk mempertimbangkan jaringan patronase dan struktur kekuasaan daerah.
- Menyusun pesan advokasi yang adaptif untuk audiens berbeda: legislatif, eksekutif daerah, dan masyarakat sipil.

CPMK	CPL yang didukung	Bobot Sub-CPMK	Estimasi Waktu
CPMK-3	CPL-07 dan CPL-09	14%	2 minggu (1.020 menit)

7.2 Pemantik

Mari memulai

Anda memiliki data yang kuat dan problem statement yang tajam. Namun, ketika dipaparkan di depan DPRD, gagasan Anda ditanggapi dingin, sementara usulan lain yang datanya lemah justru disetujui.

Menurut Anda, apa yang terjadi? Apakah bukti saja cukup untuk mengubah kebijakan? Apa lagi yang dibutuhkan?

7.3 Peta Konsep



Gambar 7.1 Peta konsep Unit 6

7.4 Uraian Materi

7.4.1 Hakikat Advokasi Kebijakan

Advokasi kebijakan adalah upaya terencana dan sistematis untuk memengaruhi pembuat keputusan agar menetapkan, mengubah, atau melaksanakan kebijakan tertentu demi kepentingan publik. Advokasi bukan sekadar protes. Ia memadukan **bukti**, **relasi**, dan **komunikasi**. Bukti meyakinkan secara rasional; relasi membuka akses kepada pembuat keputusan; komunikasi menerjemahkan bukti menjadi pesan yang bermakna bagi setiap audiens.

Advokasi juga merupakan bagian dari **pemberdayaan masyarakat**. Advokasi yang baik tidak hanya berbicara atas nama warga terdampak, tetapi melibatkan mereka sebagai subjek yang menyuarakan kepentingannya sendiri. Di sinilah modal sosial yang menjembatani (Putnam, 1993) dan masyarakat sipil yang mandiri (Hikam, 1999) berperan.

7.4.2 Komponen Strategi Advokasi

Tabel 7.1 Komponen dokumen strategi advokasi

Komponen	Pertanyaan kunci
Tujuan advokasi	Perubahan kebijakan spesifik apa yang ingin dicapai, dan kapan? Rumuskan secara SMART: spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu.
Target	Siapa pembuat keputusan (target primer) dan siapa yang dapat memengaruhinya (target sekunder)?
Peta pemangku kepentingan	Bagaimana posisi, kepentingan, dan pengaruh setiap aktor terhadap isu?
Pesan kunci	Apa pesan utama untuk setiap audiens?
Saluran komunikasi	Melalui forum, media, atau jalur apa pesan disampaikan?
Tahapan aksi	Kegiatan apa, oleh siapa, kapan, dan dengan indikator keberhasilan apa?
Risiko dan mitigasi	Hambatan apa yang mungkin muncul dan bagaimana mengantisipasinya?

7.4.3 Pemetaan Pemangku Kepentingan

Gunakan kembali peta aktor dari Unit 1–4, tetapi kini dari sudut pandang isu advokasi. Untuk setiap aktor, tentukan **posisi** (mendukung, netral, menolak), **kepentingan** terhadap isu, dan **tingkat pengaruh** atas keputusan. Tempatkan aktor pada matriks pengaruh-kepentingan berikut.

Tabel 7.2 Matriks pengaruh-kepentingan dan strategi pelibatan

	Kepentingan rendah	Kepentingan tinggi
Pengaruh tinggi	Jaga kepuasan: berikan informasi ringkas dan hindari menjadikan mereka penentang.	Kelola dekat: libatkan secara intensif sebagai mitra atau sasaran utama lobi.
Pengaruh rendah	Pantau: perhatikan perkembangan sikapnya.	Informasikan dan berdayakan: jadikan basis dukungan dan suara warga.

Carilah **tokoh pendukung kunci** (*champion*) di dalam lembaga pembuat keputusan, misalnya anggota DPRD atau kepala dinas yang memiliki kepentingan sejalan. Kenali pula **penentang potensial**, termasuk aktor yang kepentingan patronasenya terganggu oleh kebijakan yang diusulkan.

7.4.4 Pintu Masuk Kebijakan di Daerah

Advokasi lebih berhasil jika diarahkan pada momen pengambilan keputusan yang tepat. Di daerah, dua jalur utama adalah siklus perencanaan dan penganggaran serta proses pembentukan peraturan daerah.

Tabel 7.3 Pintu masuk advokasi kebijakan daerah

Jalur	Tahapan	Peluang advokasi
Perencanaan dan penganggaran	Musrenbang → RKPD → KUA-PPAS → RAPBD → penetapan APBD	Mengusulkan program di musrenbang, memengaruhi prioritas RKPD, menyampaikan masukan saat pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD di DPRD
Pembentukan perda	Program pembentukan perda (Propemperda) → penyusunan → pembahasan → penetapan	Mengusulkan materi perda, menyampaikan masukan dalam rapat dengar pendapat dan konsultasi publik
Pengawasan pelaksanaan	Rapat kerja DPRD, laporan kinerja, pengaduan pelayanan	Memantau pelaksanaan dan melaporkan penyimpangan melalui kanal resmi

7.4.5 Pesan dan Saluran untuk Audiens Berbeda

Pesan advokasi yang efektif mengikuti alur **masalah, bukti, solusi, dan ajakan bertindak**. Isinya disesuaikan dengan kepentingan setiap audiens.

Tabel 7.4 Adaptasi pesan per audiens

Audiens	Kepentingan utama	Penekanan pesan	Saluran
DPRD	Aspirasi konstituen, fungsi anggaran dan pengawasan	Dampak bagi warga di daerah pemilihan, kebutuhan anggaran, dasar hukum	Rapat dengar pendapat, audiensi fraksi, reses
Eksekutif daerah	Target RPJMD, kinerja perangkat daerah, kepatuhan regulasi	Keselarasan dengan RPJMD, kelayakan teknis, indikator kinerja	Audiensi, forum perangkat daerah, musrenbang
Masyarakat sipil dan warga	Kebutuhan sehari-hari, keadilan, partisipasi	Cerita dampak nyata, hak warga, cara terlibat	Pertemuan warga, media lokal, media sosial, koalisi organisasi

7.4.6 Advokasi dalam Konteks Kekuasaan Lokal

Di daerah dengan jaringan patronase yang kuat, advokasi menghadapi risiko khusus: usulan bisa diterima secara formal tetapi diblokkan dalam pelaksanaan, atau kelompok advokasi dikooptasi dengan tawaran proyek dan jabatan. Beberapa prinsip berikut membantu menjaga integritas advokasi.

- Bangun **koalisi lintas kelompok** agar advokasi tidak bergantung pada satu patron.
- Gunakan **transparansi** sebagai kekuatan: publikasikan data dan tuntutan secara terbuka.
- Tolak imbalan pribadi dalam bentuk apa pun dan nyatakan **independensi** kelompok.
- Kawal **pelaksanaan**, bukan hanya penetapan kebijakan.
- Hindari mobilisasi berbasis sentimen suku, agama, atau golongan yang dapat memicu konflik.

7.5 Studi Kasus

Advokasi air bersih di Kabupaten X (lanjutan ilustrasi Unit 5)

Kelompok mahasiswa mengadvokasi peningkatan layanan air bersih di kecamatan pesisir Kabupaten X. Ketua komisi yang membidangi infrastruktur di DPRD berasal dari daerah pemilihan pesisir, tetapi fraksinya berada di luar koalisi bupati. Kepala dinas terkait mendukung secara pribadi, tetapi khawatir program baru menggeser proyek yang telah dijanjikan kepada kontraktor tertentu. Kelompok nelayan dan organisasi perempuan setempat bersedia terlibat, sedangkan media lokal tertarik meliput jika ada cerita warga yang kuat.

Catatan: kasus ini disusun sebagai ilustrasi pembelajaran dan tidak merujuk pada daerah tertentu.

Pertanyaan analisis:

1. Tempatkan setiap aktor pada matriks pengaruh-kepentingan (Tabel 7.2).
2. Siapa tokoh pendukung kunci yang paling strategis, dan apa risikonya?
3. Pada tahap mana dalam siklus perencanaan dan penganggaran advokasi sebaiknya dilakukan?
4. Susun satu pesan kunci untuk DPRD dan satu untuk warga.

7.6 Aktivitas Pembelajaran

Minggu 11 — Lokakarya strategi advokasi

Luring (kelas)

- Dosen memaparkan komponen strategi advokasi dan contoh advokasi yang berhasil dalam konteks KTI (20 menit).
- Kelompok mengerjakan peta pemangku kepentingan secara visual di kertas plano dan menyusun draf strategi menggunakan kanvas cetak (60 menit).
- Dosen melakukan konsultasi keliling ke setiap kelompok.

Daring (LMS)

- Pelajari templat strategi advokasi dan contoh dokumen advokasi pemerintahan daerah di LMS.
- Susun draf awal peta pemangku kepentingan dan pesan kunci secara kolaboratif melalui platform daring.

Luaran: Draf dokumen strategi advokasi kelompok 600–900 kata.

Minggu 12 — Simulasi panel advokasi

Luring (kelas)

- Setiap kelompok mempresentasikan strategi advokasi (10 menit paparan, 5 menit tanya jawab) kepada panel mahasiswa yang berperan sebagai DPRD, eksekutif daerah, dan masyarakat sipil.
- Panel menggunakan rubrik dan menyiapkan minimal satu pertanyaan kritis sesuai peran.
- Dosen bertindak sebagai moderator dan penilai utama, lalu memimpin pleno tentang pola kekuatan dan kelemahan lintas kelompok.

Daring (LMS)

- Siapkan salindia atau media visual secara kolaboratif dan berlatih dalam kelompok.
- Isi formulir swa-nilai sebelum simulasi dan ikuti forum refleksi setelah simulasi.

Luaran: Simulasi presentasi advokasi dan laporan refleksi pasca-simulasi individual 400–600 kata.

7.7 Rangkuman

- Advokasi kebijakan memadukan bukti, relasi, dan komunikasi untuk memengaruhi pembuat keputusan, sekaligus memberdayakan warga terdampak.
- Strategi advokasi memuat tujuan SMART, target, peta pemangku kepentingan, pesan kunci, saluran, tahapan aksi, serta risiko dan mitigasi.
- Matriks pengaruh-kepentingan menentukan cara melibatkan setiap aktor; tokoh pendukung kunci dan penentang potensial perlu dikenali.
- Pintu masuk advokasi di daerah terutama siklus perencanaan-penganggaran dan pembentukan perda.
- Dalam konteks patronase, integritas advokasi dijaga melalui koalisi, transparansi, independensi, dan pengawalan pelaksanaan.

7.8 Latihan

Kerjakan latihan berikut secara mandiri. Bagian A terdiri atas 5 soal pilihan ganda (skor 10 per soal); Bagian B terdiri atas 2 soal uraian (skor 25 per soal). Skor maksimum 100.

A. Pilihan Ganda

1. Tujuan advokasi yang dirumuskan secara SMART adalah ...
 - A. Meningkatkan kesejahteraan nelayan
 - B. Masuknya program perluasan jaringan air bersih kecamatan pesisir dalam RKPD Kabupaten X tahun depan
 - C. Mendorong pemerintah lebih peduli
 - D. Menolak semua proyek kontraktor
2. Aktor dengan pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi terhadap isu sebaiknya ...
 - A. dipantau
 - B. diinformasikan
 - C. dikelola dekat
 - D. diabaikan

3. Urutan siklus perencanaan dan penganggaran daerah yang tepat adalah ...
 - A. RAPBD → Musrenbang → RKPD → KUA-PPAS
 - B. Musrenbang → RKPD → KUA-PPAS → RAPBD
 - C. RKPD → RAPBD → Musrenbang → KUA-PPAS
 - D. KUA-PPAS → Musrenbang → RAPBD → RKPD
4. Pesan advokasi untuk anggota DPRD paling tepat menekankan ...
 - A. cerita pribadi pegiat advokasi
 - B. dampak bagi warga di daerah pemilihan dan kebutuhan anggaran
 - C. kritik terhadap partai lain
 - D. istilah teknis akademis
5. Cara menjaga integritas advokasi di daerah dengan jaringan patronase kuat adalah ...
 - A. menerima proyek sebagai imbalan dukungan
 - B. bergantung pada satu patron yang berpengaruh
 - C. membangun koalisi lintas kelompok dan bersikap transparan
 - D. memobilisasi sentimen kesukuan

B. Uraian

1. Susun peta pemangku kepentingan untuk isu advokasi kelompok Anda (minimal enam aktor) dan tentukan strategi pelibatan untuk masing-masing.
2. Rancang pesan kunci untuk tiga audiens (DPRD, eksekutif daerah, masyarakat) dan jelaskan saluran komunikasi yang paling tepat untuk masing-masing.

7.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 7.5 Kunci jawaban pilihan ganda

No.	Kunci	Pembahasan singkat
1	B	Pilihan B spesifik, terukur, relevan, dan berbatas waktu.
2	C	Aktor berpengaruh tinggi dan berkepentingan tinggi adalah sasaran pelibatan intensif.
3	B	Usulan musrenbang dirumuskan dalam RKPD, lalu KUA-PPAS, kemudian RAPBD.
4	B	DPRD berkepentingan pada konstituen dan fungsi anggaran.
5	C	Koalisi dan transparansi mencegah kooptasi dan ketergantungan pada patron.

Pedoman soal uraian nomor 1

- Aktor relevan dengan posisi, kepentingan, dan pengaruh yang dijelaskan (skor maksimal 10).
- Penempatan pada matriks dan strategi pelibatan tepat (skor maksimal 10).
- Mempertimbangkan dinamika kekuasaan dan patronase dari hasil kajian (skor maksimal 5).

Pedoman soal uraian nomor 2

- Setiap pesan mengikuti alur masalah-bukti-solusi-ajakan (skor maksimal 10).
- Pesan disesuaikan dengan kepentingan audiens (skor maksimal 10).
- Saluran komunikasi tepat dan realistis (skor maksimal 5).

7.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada Subbab 1.8. Jika tingkat penguasaan Anda **70% atau lebih**, lanjutkan ke unit berikutnya. Jika kurang dari 70%, lakukan remedial berikut sebelum melanjutkan.

Kondisi	Tindak lanjut
< 70% (remedial)	Kerjakan kembali pertanyaan kasus nomor 1 dan 4, lalu bandingkan hasilnya dengan Tabel 7.2 dan 7.4 sebelum mengerjakan ulang soal yang salah.
≥ 90% (pengayaan)	Pelajari dokumen RKPD daerah kajian dan identifikasi program yang paling terkait dengan isu advokasi kelompok; tulis catatan 300 kata tentang peluang advokasinya.

7.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

Refleksi diri

1. Peran apa yang Anda mainkan dalam simulasi, dan apa yang Anda pelajari dari sudut pandang peran tersebut?
2. Pertanyaan panel mana yang paling sulit dijawab kelompok Anda? Mengapa?
3. Bagaimana kelompok Anda menyesuaikan strategi dengan kondisi politik lokal?

NILAI ICHSA-N

Creativity dan **Adaptability**: merancang strategi advokasi yang inovatif dan realistis serta menyesuakannya dengan konteks lokal; **Service**: menempatkan kepentingan warga terdampak sebagai tujuan advokasi.

7.12 Referensi Unit

- Hadiz, V. R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford University Press.
- Turner, M., & Hulme, D. (1997). *Governance, Administration and Development: Making the State Work*. Macmillan.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Hikam, M. A. S. (1999). *Demokrasi dan Civil Society*. LP3ES.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

BAB VIII · UNIT 7 · MINGGU 13–14

Policy Brief yang Akuntabel dan Beretika

Menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti dengan komitmen antikorupsi dan kebangsaan

8.1 Capaian Pembelajaran Unit

Sub-CPMK7

Menyusun policy brief yang akuntabel dan beretika atas isu politik lokal yang dikaji, mencerminkan komitmen antikorupsi dan nilai-nilai kebangsaan dalam rekomendasi yang dihasilkan secara kolaboratif.

Indikator capaian — mahasiswa mampu:

- Mengidentifikasi isu politik lokal dari hasil kajian sebelumnya dan merumuskannya sebagai masalah kebijakan yang spesifik dan terukur.
- Menyusun kerangka *policy brief* secara kolaboratif yang memuat latar belakang masalah, analisis bukti, dan posisi rekomendasi yang beretika.
- Mengintegrasikan prinsip antikorupsi dan nilai-nilai kebangsaan secara eksplisit dalam rekomendasi kebijakan.
- Mengevaluasi kesesuaian data yang menjadi dasar rekomendasi dengan standar akuntabilitas dan integritas kelembagaan.
- Menunjukkan kolaborasi lintas perspektif dengan pembagian peran yang jelas dan terdokumentasi.

CPMK	CPL yang didukung	Bobot Sub-CPMK	Estimasi Waktu
CPMK-4	CPL-01 dan CPL-09	14%	2 minggu (1.020 menit)

8.2 Pemantik

Mari memulai

Seorang bupati hanya punya waktu lima menit untuk membaca usulan Anda di sela jadwal yang padat. Setelah lima menit, ia harus memutuskan apakah usulan itu layak ditindaklanjuti.

Apa yang harus tertulis di paragraf pertama agar ia terus membaca? Dan bagaimana Anda meyakinkannya bahwa rekomendasi Anda bebas dari kepentingan tersembunyi?

8.3 Peta Konsep



Gambar 8.1 Peta konsep Unit 7

8.4 Uraian Materi

8.4.1 Hakikat Policy Brief

Policy brief adalah dokumen ringkas yang menyajikan masalah kebijakan, bukti, dan rekomendasi kepada pembuat keputusan yang sibuk. Berbeda dari laporan akademis, *policy brief* ditulis untuk **dibaca cepat dan ditindaklanjuti**: kesimpulan disajikan di awal, bahasa lugas, dan rekomendasi dapat langsung dilaksanakan. *Policy brief* dalam mata kuliah ini merupakan puncak proyek semester yang mengintegrasikan peta aktor (Unit 1–4), problem statement (Unit 5), dan strategi advokasi (Unit 6).

8.4.2 Anatomi Policy Brief

Tabel 8.1 Struktur policy brief (4–6 halaman A4, spasi 1,5, huruf 12)

Bagian	Isi	Panjang
Judul	Menyatakan isu dan arah solusi secara menarik	1 kalimat
Ringkasan eksekutif	Masalah, temuan kunci, dan rekomendasi utama	± 150 kata
Rumusan masalah	Problem statement yang telah difinalisasi pada Unit 5	± 0,5 halaman
Analisis bukti	Data, penyebab, dampak, konteks aktor dan kewenangan; tabel atau grafik	1–1,5 halaman
Opsi kebijakan	Dua sampai tiga alternatif dan penilaiannya	± 1 halaman
Rekomendasi operasional	Tindakan spesifik: siapa, apa, kapan, sumber anggaran, indikator	± 1 halaman
Pernyataan nilai etis	Komitmen antikorupsi, kebangsaan, dan keterbukaan konflik kepentingan	± 0,5 halaman
Referensi dan lampiran	Sumber data, catatan revisi, lembar kontribusi anggota	—

8.4.3 Menilai Opsi Kebijakan

Sebelum merekomendasikan, bandingkan beberapa opsi secara jujur, termasuk opsi "tidak melakukan perubahan" sebagai pembanding. Gunakan kriteria berikut.

Tabel 8.2 Kriteria penilaian opsi kebijakan

Kriteria	Pertanyaan penuntun
Efektivitas	Seberapa besar opsi ini menyelesaikan masalah inti?
Efisiensi	Apakah manfaatnya sebanding dengan biaya dan sumber daya?
Keadilan	Apakah kelompok paling terdampak memperoleh manfaat terbesar?
Kelayakan politik	Apakah opsi ini dapat diterima aktor kunci berdasarkan peta pemangku kepentingan?
Kewenangan dan legalitas	Apakah opsi ini dalam kewenangan daerah dan sesuai peraturan?
Risiko integritas	Apakah opsi ini membuka celah korupsi atau konflik kepentingan?

8.4.4 Merumuskan Rekomendasi Operasional

Rekomendasi yang baik bersifat **operasional**: jelas siapa pelaksananya, apa tindakannya, kapan dilakukan, dari mana anggarannya, dan bagaimana keberhasilannya diukur. Rekomendasi seperti "pemerintah perlu lebih memperhatikan masalah air bersih" terlalu umum untuk ditindaklanjuti.

Tabel 8.3 Contoh matriks rekomendasi operasional (ilustrasi)

Rekomendasi	Pelaksana	Waktu	Sumber dana	Indikator
Memasukkan program perluasan jaringan air bersih kecamatan pesisir ke dalam RKPD	Bappeda dan dinas terkait	Siklus perencanaan tahun berjalan	APBD kabupaten	Program tercantum dalam RKPD dan APBD
Membuka data rencana dan realisasi proyek secara daring	Dinas terkait dan dinas kominfo	Sejak kontrak ditandatangani	APBD (rutin)	Data proyek dapat diakses publik
Membentuk forum pemantauan warga	Pemerintah kecamatan bersama organisasi warga	Triwulanan	Swadaya dan APBD	Laporan pemantauan terbit tiap triwulan

8.4.5 Akuntabilitas, Antikorupsi, dan Nilai Kebangsaan

Policy brief yang beretika bukan hanya benar secara data, tetapi juga bersih dari kepentingan tersembunyi dan mempertimbangkan dampaknya terhadap persatuan. Terapkan prinsip berikut.

- **Transparansi**: seluruh data dan sumbernya dapat ditelusuri; keterbatasan data diakui.
- **Akuntabilitas**: rekomendasi memuat mekanisme pertanggungjawaban dan pemantauan yang jelas.
- **Pencegahan korupsi**: rekomendasi mengantisipasi celah pada titik rawan tata kelola daerah, seperti perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang/jasa, perizinan, dan manajemen ASN, yang juga menjadi fokus program pencegahan korupsi KPK di pemerintah daerah.
- **Keterbukaan konflik kepentingan**: penulis menyatakan tidak memiliki kepentingan pribadi atau hubungan dengan pihak yang diuntungkan.
- **Nilai kebangsaan**: rekomendasi tidak diskriminatif, menghormati keberagaman, dan memperkuat kesatuan dalam kerangka NKRI.

Mahfud MD (2010) mengingatkan bahwa produk hukum dan kebijakan selalu dipengaruhi konfigurasi politik. Karena itu, penyusun *policy brief* perlu menyadari kepentingan politik di balik setiap opsi dan menjaga agar rekomendasinya tetap berpihak pada kepentingan publik.

8.4.6 Kolaborasi dan Jejak Proses

Policy brief disusun secara kelompok. Kolaborasi yang sehat ditandai pembagian peran yang jelas (misalnya penanggung jawab data, penulis analisis, penulis rekomendasi, penyunting) dan terdokumentasi dalam **lembar kontribusi anggota**. Setiap perubahan dari draf ke versi final dicatat dalam **catatan revisi**. Kedua dokumen ini dinilai sebagai bukti proses kolaborasi.

Tabel 8.4 Rubrik *policy brief* final

Dimensi	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
Ketajaman rumusan masalah	Spesifik, terukur, dalam kewenangan daerah	Jelas dengan sedikit kekaburan	Terlalu umum	Tidak jelas
Kualitas dan akuntabilitas bukti	Data kredibel, ditriangulasi, sumber lengkap	Sebagian besar kredibel dan bersumber	Data terbatas	Tanpa data atau tidak bersumber
Operasionalitas dan etika rekomendasi	Operasional penuh; prinsip antikorupsi dan kebangsaan eksplisit	Operasional; etika disebut	Kurang operasional	Normatif dan umum
Kualitas kolaborasi	Peran jelas, kontribusi merata, jejak revisi lengkap	Peran jelas, jejak revisi ada	Kontribusi timpang	Tanpa dokumentasi

8.5 Studi Kasus

Dua rumusan rekomendasi

Rekomendasi A: *"Pemerintah daerah harus segera memperbaiki layanan air bersih dan memberantas korupsi dalam proyek-proyek infrastruktur."*

Rekomendasi B: *"Bappeda dan dinas terkait memasukkan program perluasan jaringan air bersih di tiga desa pesisir ke dalam RKPD tahun depan, dengan paket pengadaan yang diumumkan secara terbuka melalui LPSE dan data realisasi yang dipublikasikan setiap triwulan untuk dipantau forum warga."*

Catatan: contoh ini disusun sebagai ilustrasi pembelajaran.

Pertanyaan analisis:

1. Bandingkan kedua rekomendasi menggunakan unsur siapa, apa, kapan, sumber dana, dan indikator.
2. Unsur antikorupsi apa yang tersirat dalam Rekomendasi B?
3. Perbaiki Rekomendasi A agar operasional tanpa kehilangan pesan antikorupsinya.

8.6 Aktivitas Pembelajaran

Minggu 13 — Klinik penulisan *policy brief*

Luring (kelas)

- Dosen memaparkan anatomi *policy brief* yang akuntabel: masalah, bukti, rekomendasi, dan nilai etis.
- Kelompok menyusun draf awal di kelas dengan bimbingan dosen secara bergiliran.

- Antarkelompok melakukan revidu singkat menggunakan rubrik yang disediakan.

Daring (LMS)

- Pelajari panduan penulisan *policy brief* dan contoh *policy brief* tata kelola daerah di LMS.
- Telusuri data terbuka tambahan dan dokumentasikan sumbernya dalam lembar kerja digital.

Luaran: Draf awal policy brief 2–3 halaman: judul isu, rumusan masalah, ringkasan bukti, dan rancangan rekomendasi.

Minggu 14 — Peer review dan finalisasi

Luring (kelas)

- Setiap kelompok mempresentasikan *policy brief* secara singkat (5 menit); kelompok lain menilai menggunakan rubrik pada Tabel 8.4.
- Dosen memberi penguatan dan umpan balik menyeluruh.

Daring (LMS)

- Selesaikan revisi melalui dokumen bersama dan catat perubahan dari draf ke versi final.
- Ikuti konsultasi daring bila perlu dan unggah versi final beserta lampiran.

Luaran: Policy brief final 4–6 halaman beserta catatan revisi dan lembar kontribusi anggota.

8.7 Rangkuman

- *Policy brief* adalah dokumen ringkas untuk pembuat keputusan: kesimpulan di awal, bahasa lugas, rekomendasi dapat ditindaklanjuti.
- Strukturnya meliputi judul, ringkasan eksekutif, rumusan masalah, analisis bukti, opsi, rekomendasi operasional, pernyataan nilai etis, dan referensi.
- Opsi kebijakan dinilai berdasarkan efektivitas, efisiensi, keadilan, kelayakan politik, kewenangan, dan risiko integritas.
- Rekomendasi operasional menjawab siapa, apa, kapan, sumber dana, dan indikator.
- Akuntabilitas, pencegahan korupsi, keterbukaan konflik kepentingan, nilai kebangsaan, dan jejak kolaborasi merupakan bagian dari mutu *policy brief*.

8.8 Latihan

Kerjakan latihan berikut secara mandiri. Bagian A terdiri atas 5 soal pilihan ganda (skor 10 per soal); Bagian B terdiri atas 2 soal uraian (skor 25 per soal). Skor maksimum 100.

A. Pilihan Ganda

1. Ciri utama *policy brief* yang membedakannya dari laporan akademis adalah ...
 - A. menggunakan banyak teori
 - B. menyajikan kesimpulan dan rekomendasi di awal untuk pembaca yang sibuk
 - C. panjangnya minimal 20 halaman
 - D. tidak memerlukan data

2. Bagian *policy brief* yang memuat masalah, temuan kunci, dan rekomendasi utama dalam sekitar 150 kata adalah ...
 - A. rumusan masalah
 - B. ringkasan eksekutif
 - C. analisis bukti
 - D. lampiran
3. Kriteria yang menilai apakah suatu opsi dapat diterima aktor-aktor kunci adalah ...
 - A. efisiensi
 - B. keadilan
 - C. kelayakan politik
 - D. legalitas
4. Rekomendasi berikut yang paling **operasional** adalah ...
 - A. Pemerintah perlu lebih transparan
 - B. DPRD harus peduli rakyat
 - C. Dinas terkait mempublikasikan data realisasi proyek setiap triwulan melalui situs resmi
 - D. Korupsi harus diberantas
5. Pernyataan bahwa penulis tidak memiliki hubungan dengan pihak yang diuntungkan rekomendasi merupakan wujud prinsip ...
 - A. efisiensi
 - B. keterbukaan konflik kepentingan
 - C. kelayakan politik
 - D. keadilan

B. Uraian

1. Susun matriks penilaian untuk dua opsi kebijakan atas isu kelompok Anda menggunakan kriteria pada Tabel 8.2, lalu tentukan opsi yang direkomendasikan.
2. Tulis bagian "Pernyataan nilai etis" untuk *policy brief* kelompok Anda (150–200 kata) yang memuat komitmen antikorupsi dan nilai kebangsaan.

8.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 8.5 Kunci jawaban pilihan ganda

No.	Kunci	Pembahasan singkat
1	B	Policy brief ditulis untuk dibaca cepat dan ditindaklanjuti.
2	B	Ringkasan eksekutif merangkum seluruh isi dalam format singkat.
3	C	Kelayakan politik menilai penerimaan aktor berdasarkan peta pemangku kepentingan.
4	C	Pilihan C menyebut pelaksana, tindakan, waktu, dan media yang dapat diukur.
5	B	Menyatakan tidak adanya konflik kepentingan menjaga integritas rekomendasi.

Pedoman soal uraian nomor 1

- Dua opsi relevan dan dinilai dengan seluruh kriteria (skor maksimal 12).
- Pilihan opsi dijustifikasi dengan bukti dan peta pemangku kepentingan (skor maksimal 8).
- Risiko integritas dianalisis (skor maksimal 5).

Pedoman soal uraian nomor 2

- Prinsip antikorupsi dinyatakan secara konkret dan terkait isu (skor maksimal 10).
- Nilai kebangsaan dan nondiskriminasi tercermin (skor maksimal 8).
- Keterbukaan konflik kepentingan dan bahasa lugas (skor maksimal 7).

8.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada Subbab 1.8. Jika tingkat penguasaan Anda **70% atau lebih**, lanjutkan ke unit berikutnya. Jika kurang dari 70%, lakukan remedial berikut sebelum melanjutkan.

Kondisi	Tindak lanjut
< 70% (remedial)	Kerjakan ulang pertanyaan kasus nomor 3 dan gunakan Tabel 8.3 sebagai model, lalu kerjakan kembali soal yang salah.
≥ 90% (pengayaan)	Ubah <i>policy brief</i> kelompok menjadi infografis satu halaman untuk warga, dengan tetap mencantumkan sumber data.

8.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

Refleksi diri

1. Rekomendasi mana yang paling Anda yakini dapat dilaksanakan, dan mengapa?
2. Apa tantangan terbesar dalam menulis secara ringkas tanpa kehilangan bukti?
3. Bagaimana kelompok Anda mengelola perbedaan pendapat saat menyusun rekomendasi?

NILAI ICHSA-N

Integrity dan Nationalism: menyusun rekomendasi yang bebas dari kepentingan pribadi, berpihak pada kepentingan publik, dan memperkuat persatuan; **Service:** memastikan kelompok paling terdampak memperoleh manfaat.

8.12 Referensi Unit

Turner, M., & Hulme, D. (1997). *Governance, Administration and Development: Making the State Work*. Macmillan.

Mahfud MD, M. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Kajian Sistem Integritas Pemerintah Daerah*. KPK RI.

Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

BAB IX · UNIT 8 · MINGGU 15

Presentasi Kolaboratif dan Refleksi Integritas

Menyajikan hasil kajian semester dan merefleksikan komitmen sebagai analis kebijakan

9.1 Capaian Pembelajaran Unit

Sub-CPMK8

Mempresentasikan hasil kajian politik lokal secara kolaboratif dan merefleksikan pembelajaran serta komitmen integritas diri dalam peran tim lintas disiplin melalui presentasi final dan jurnal refleksi.

Indikator capaian — mahasiswa mampu:

- Mempresentasikan hasil kajian secara sistematis dan persuasif kepada audiens akademik, mencakup temuan analisis, *policy brief*, dan rekomendasi.
- Mempertahankan argumen secara kritis dalam tanya jawab dengan menunjukkan penguasaan konsep dan data.
- Menampilkan kolaborasi tim melalui pembagian peran presentasi yang proporsional dan terdokumentasi.
- Merefleksikan perkembangan pemahaman pribadi tentang politik lokal dan mengartikulasikan komitmen integritas diri melalui jurnal refleksi.
- Mengevaluasi kontribusi diri sendiri dan anggota tim secara jujur dan konstruktif.

CPMK	CPL yang didukung	Bobot Sub-CPMK	Estimasi Waktu
CPMK-4	CPL-01 dan CPL-09	7%	1 minggu (510 menit)

9.2 Pemantik

Mari memulai

Bayangkan lima tahun dari sekarang Anda bekerja sebagai analis kebijakan di pemerintah daerah, staf ahli DPRD, atau pegiat organisasi masyarakat sipil. Suatu hari, seseorang menawarkan imbalan agar Anda mengubah data dalam sebuah kajian.

Apa yang akan Anda lakukan? Apa yang Anda pelajari semester ini yang membantu Anda menjawab pertanyaan tersebut?

9.3 Peta Konsep



Gambar 9.1 Peta konsep Unit 8

9.4 Uraian Materi

9.4.1 Menyusun Presentasi yang Persuasif

Presentasi final adalah kesempatan untuk menceritakan perjalanan kajian kelompok secara utuh: dari peta kekuasaan di daerah, isu yang dipilih, hingga rekomendasi kebijakan. Presentasi yang persuasif memiliki **alur cerita**, bukan sekadar urutan salindia.

Tabel 9.1 Alur presentasi final (10–12 menit)

Bagian	Isi	Waktu
Pembuka	Fakta atau cerita warga yang menggugah; pertanyaan kunci	± 1 menit
Konteks kekuasaan	Ringkasan peta aktor dan relasi kekuasaan daerah kajian	± 2 menit
Masalah dan bukti	Problem statement dan data utama	± 2–3 menit
Strategi dan rekomendasi	Strategi advokasi dan rekomendasi operasional <i>policy brief</i>	± 3–4 menit
Penutup	Pesan utama dan ajakan bertindak	± 1 menit

Untuk media visual, gunakan prinsip **satu salindia satu gagasan**, huruf yang terbaca dari belakang ruangan, grafik yang sederhana dengan sumber data, dan sedikit teks. Salindia adalah pendukung, bukan naskah untuk dibacakan.

9.4.2 Mengelola Tanya Jawab

Tanya jawab menguji penguasaan konsep dan data. Dengarkan pertanyaan sampai selesai, ulangi atau parafrasakan bila perlu, jawab langsung dengan merujuk pada bukti, lalu kaitkan kembali dengan pesan utama. Jika tidak mengetahui jawabannya, akui dengan jujur dan tawarkan untuk menelusurinya. Kejujuran dalam tanya jawab adalah wujud integritas akademik.

9.4.3 Kolaborasi dan Evaluasi Kontribusi Tim

Pembagian peran presentasi harus proporsional dan tercatat. Setiap anggota sebaiknya menyampaikan bagian yang paling ia kuasai dan siap menjawab pertanyaan tentang bagian lain. Di akhir proyek, setiap mahasiswa mengevaluasi kontribusi diri dan anggota tim secara jujur menggunakan lembar berikut.

Tabel 9.2 Lembar evaluasi kontribusi tim

Nama anggota	Peran utama	Kehadiran dan ketepatan waktu (1–4)	Kualitas kontribusi (1–4)	Kerja sama (1–4)	Catatan
(diri sendiri)					

9.4.4 Menulis Jurnal Refleksi

Refleksi adalah proses menengok kembali pengalaman untuk menarik makna dan menentukan tindakan di masa depan. Siklus refleksi Gibbs (1988) dapat dipakai sebagai panduan: **deskripsi** (apa yang terjadi), **perasaan** (apa yang dirasakan), **evaluasi** (apa yang baik dan kurang baik), **analisis** (mengapa demikian), **kesimpulan** (apa yang dipelajari), dan **rencana tindakan** (apa yang akan dilakukan selanjutnya).

Jurnal refleksi individual (500–700 kata) memuat tiga hal sesuai RPS:

1. Tiga pembelajaran substantif yang paling bermakna sepanjang semester.
2. Evaluasi jujur atas kontribusi diri dalam tim.
3. Satu komitmen konkret terkait integritas dalam peran sebagai analis atau praktisi kebijakan di masa depan.

Gunakan catatan refleksi di akhir setiap unit dan refleksi awal pada Subbab 1.8 sebagai bahan. Bandingkan pemahaman Anda di awal dan di akhir semester untuk menunjukkan perkembangan belajar.

Contoh komitmen integritas yang konkret

Kurang konkret: *"Saya akan selalu jujur."*

Konkret: *"Dalam setiap kajian yang saya tulis, saya akan mencantumkan seluruh sumber data dan menyatakan keterbatasannya, serta menolak permintaan mengubah temuan dari pihak mana pun."*

9.5 Studi Kasus

Refleksi seorang mahasiswa (ilustrasi)

"Di awal semester saya mengira politik lokal hanya soal siapa yang menang pilkada. Setelah memetakan aktor di kabupaten kajian kami, saya melihat bahwa keputusan anggaran sering ditentukan di luar ruang sidang. Saat menyusun policy brief, kelompok kami sempat ingin memakai data yang belum jelas sumbernya karena mendukung argumen kami. Akhirnya kami memutuskan tidak memakainya. Saya belajar bahwa integritas diuji justru ketika data tidak berpihak pada kita."

Pertanyaan analisis:

1. Tahap siklus Gibbs mana saja yang tampak dalam refleksi tersebut? Tahap mana yang belum muncul?
2. Lengkapi refleksi tersebut dengan satu komitmen integritas yang konkret.

9.6 Aktivitas Pembelajaran

Minggu 15 — Presentasi final dan jurnal refleksi

Luring (kelas)

- Setiap kelompok melakukan presentasi final (10–12 menit) menggunakan media visual, diikuti tanya jawab kritis.
- Mahasiswa mengajukan pertanyaan kritis kepada kelompok lain sebagai wujud keterlibatan akademik.
- Dosen menyampaikan umpan balik integratif yang mengaitkan capaian pembelajaran dengan peran mahasiswa sebagai calon praktisi kebijakan di KTI.

Daring (LMS)

- Pelajari panduan jurnal refleksi dan rubrik presentasi final di LMS; gunakan templat jurnal refleksi yang disediakan.
- Siapkan bahan presentasi secara kolaboratif daring.
- Unggah jurnal refleksi individual dan lembar evaluasi kontribusi tim ke LMS.

Luaran: Presentasi final kelompok, jurnal refleksi individual 500–700 kata, dan lembar evaluasi kontribusi tim.

9.7 Rangkuman

- Presentasi final menceritakan perjalanan kajian secara utuh dengan alur yang persuasif dan media visual yang mendukung.
- Tanya jawab dikelola dengan mendengarkan, menjawab berbasis bukti, dan jujur mengakui keterbatasan.
- Kolaborasi dibuktikan melalui pembagian peran yang proporsional dan evaluasi kontribusi yang jujur.
- Siklus refleksi Gibbs membantu menulis jurnal yang mendalam, dari deskripsi hingga rencana tindakan.
- Komitmen integritas yang baik bersifat konkret, terukur, dan terkait peran profesional di masa depan.

9.8 Latihan: Swa-Nilai Presentasi dan Jurnal

Sebelum presentasi dan pengumpulan jurnal, nilai kesiapan Anda dengan daftar periksa berikut. Beri skor 0 (belum), 1 (sebagian), atau 2 (sudah baik). Skor maksimum 20; tingkat penguasaan = $(\text{jumlah skor} \div 20) \times 100\%$.

Tabel 9.3 Daftar periksa kesiapan

No.	Butir periksa	Skor (0–2)
1	Presentasi memiliki alur cerita dari konteks kekuasaan sampai rekomendasi.	
2	Setiap data dalam salindia mencantumkan sumber.	
3	Salindia ringkas dan terbaca.	
4	Pembagian peran presentasi proporsional dan tercatat.	
5	Kelompok telah berlatih menjawab minimal lima pertanyaan kritis.	

No.	Butir periksa	Skor (0–2)
6	Waktu presentasi sesuai (10–12 menit).	
7	Jurnal memuat tiga pembelajaran substantif.	
8	Jurnal memuat evaluasi jujur atas kontribusi diri.	
9	Jurnal memuat satu komitmen integritas yang konkret.	
10	Jurnal mengikuti tahapan refleksi dan panjangnya 500–700 kata.	
	Jumlah	

9.9 Rubrik Penilaian

Tabel 9.4 Rubrik presentasi final kelompok

Aspek	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
Sistematika	Alur utuh dan runtut dari konteks sampai rekomendasi	Runtut, sedikit lompatan	Kurang runtut	Tidak terstruktur
Penguasaan materi	Menguasai konsep dan data secara mendalam	Menguasai dengan sedikit keraguan	Sebagian kurang tepat	Banyak kekeliruan
Kemampuan menjawab pertanyaan	Tepat, berbasis bukti, meyakinkan	Memadai	Menjawab sebagian	Tidak mampu menjawab
Efektivitas komunikasi visual	Visual jelas, menarik, bersumber	Cukup jelas	Kurang mendukung	Tidak membantu

Tabel 9.5 Rubrik jurnal refleksi individual

Aspek	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
Kedalaman refleksi	Menganalisis pengalaman dan menarik makna yang kuat	Ada analisis, makna cukup jelas	Cenderung deskriptif	Hanya menceritakan kegiatan
Kejujuran evaluasi diri	Mengakui kekuatan dan kelemahan secara spesifik	Cukup jujur dan spesifik	Umum	Tidak ada evaluasi diri
Kejelasan komitmen integritas	Konkret, terukur, terkait peran profesional	Jelas tetapi kurang terukur	Normatif	Tidak ada komitmen

Persiapan UAS (Minggu 16)

UAS mencakup Sub-CPMK5 sampai Sub-CPMK8. Pelajari kembali rangkuman Unit 5–8, kerjakan ulang latihan yang belum tuntas, dan kuasai *problem statement*, strategi advokasi, serta *policy brief* kelompok Anda, karena soal UAS meminta penerapan konsep pada kasus. Kisi-kisi UAS disajikan pada bagian asesmen sumatif modul ini.

9.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada Subbab 1.8. Jika tingkat penguasaan Anda **70% atau lebih**, lanjutkan ke unit berikutnya. Jika kurang dari 70%, lakukan remedial berikut sebelum melanjutkan.

Kondisi	Tindak lanjut
< 70% (remedial)	Perbaiki butir daftar periksa yang masih bernilai 0 atau 1 dan konsultasikan draf jurnal refleksi kepada dosen melalui LMS sebelum batas pengumpulan.
≥ 90% (pengayaan)	Ubah <i>policy brief</i> kelompok menjadi artikel opini 700 kata untuk media lokal, dengan tetap menjaga akurasi data dan etika penulisan.

9.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

Refleksi diri

1. Apa perubahan terbesar dalam cara Anda memandang politik lokal sejak minggu pertama?
2. Kontribusi apa yang paling Anda banggakan dalam proyek kelompok, dan apa yang ingin Anda perbaiki?
3. Komitmen integritas apa yang akan Anda bawa ke dunia kerja?

NILAI ICHSA-N

Harmony dan **Integrity**: menghargai kerja akademik kelompok lain melalui pertanyaan yang kritis dan santun, serta mengevaluasi diri dan rekan secara jujur; **Nationalism**: menempatkan peran sebagai calon analis kebijakan untuk kemajuan daerah dan bangsa.

9.12 Referensi Unit

- Hadiz, V. R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford University Press.
- Mietzner, M. (2013). *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. NUS Press.
- Turner, M., & Hulme, D. (1997). *Governance, Administration and Development: Making the State Work*. Macmillan.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Kajian Sistem Integritas Pemerintah Daerah*. KPK RI.
- Gibbs, G. (1988). *Learning by Doing: A Guide to Teaching and Learning Methods*. Further Education Unit, Oxford Polytechnic. (bacaan pengayaan)

BAB X · ASESMEN SUMATIF

Asesmen Sumatif dan Integrasi Penilaian

Peta penilaian, kisi-kisi UTS dan UAS, rubrik, dan pengukuran ketercapaian CPMK serta CPL

10.1 Prinsip Asesmen

Asesmen dalam mata kuliah ini dirancang dengan prinsip keselarasan konstruktif: setiap instrumen mengukur Sub-CPMK tertentu, bobotnya proporsional, dan kriterianya disampaikan kepada mahasiswa sejak awal. Asesmen bersifat **otentik** (menggunakan kasus dan produk nyata), **berkelanjutan** (formatif dan sumatif), **transparan** (rubrik diumumkan), serta **akuntabel** (nilai dicatat per Sub-CPMK sehingga ketercapaian CPMK dan CPL dapat ditelusuri).

10.2 Peta Komponen Penilaian dan Sub-CPMK

Tabel berikut merinci kontribusi setiap komponen penilaian terhadap setiap Sub-CPMK. Penjumlahan per baris menghasilkan bobot Sub-CPMK (Tabel 1.6), sedangkan penjumlahan per kolom menghasilkan bobot komponen (Tabel 1.10).

Tabel 10.1 Rekonsiliasi bobot komponen penilaian dan Sub-CPMK (%)

Sub-CPMK	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	Bobot
Sub-CPMK1	8	—	7	—	—	—	—	15
Sub-CPMK2	8	—	7	—	—	—	—	15
Sub-CPMK3	7	—	7	—	—	—	—	14
Sub-CPMK4	—	7	—	—	—	—	—	7
Sub-CPMK5	—	—	—	7	—	—	7	14
Sub-CPMK6	—	—	—	7	—	—	7	14
Sub-CPMK7	—	—	—	—	10	—	4	14
Sub-CPMK8	—	—	—	—	—	7	—	7
Jumlah	23	7	21	14	10	7	18	100

K1 = kuis, esai, dan tes tertulis Unit 1–3; K2 = laporan aktor-arena; K3 = UTS; K4 = tes problem statement dan simulasi advokasi; K5 = policy brief; K6 = presentasi final dan jurnal refleksi; K7 = UAS.

10.2.1 Perhitungan Nilai Akhir dan Ketercapaian

Setiap komponen dinilai pada skala 0–100. Perhitungan dilakukan dalam tiga langkah:

1. **Nilai Sub-CPMK** = rata-rata tertimbang nilai komponen yang mengukurnya, dengan bobot pada baris Tabel 10.1.
2. **Nilai akhir** = $\Sigma (\text{nilai komponen} \times \text{bobot komponen}) \div 100$, yang hasilnya sama dengan $\Sigma (\text{nilai Sub-CPMK} \times \text{bobot Sub-CPMK}) \div 100$.
3. **Ketercapaian CPL** = rata-rata tertimbang nilai Sub-CPMK dengan bobot pada kolom CPL di Tabel 1.6. Ketercapaian CPMK dihitung dengan cara yang sama dari Sub-CPMK penyusunnya (Tabel 1.5).

Tabel 10.2 Contoh perhitungan untuk seorang mahasiswa (data ilustrasi)

Komponen	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7
Nilai (0–100)	80	75	70	85	78	88	72

Sub-CPMK	1	2	3	4	5	6	7	8
Nilai	75,33	75,33	75,00	75,00	78,50	78,50	76,29	88,00

Hasil	Nilai
Nilai akhir	77,17 (huruf B)
Ketercapaian CPL-01	76,73
Ketercapaian CPL-05	75,00
Ketercapaian CPL-07	78,50
Ketercapaian CPL-09	79,04

Nilai per Sub-CPMK dan ketercapaian CPL diunggah ke SI-OBE. Rekap kelas digunakan untuk menilai apakah capaian memenuhi ambang yang ditetapkan program studi dan untuk merencanakan perbaikan pembelajaran.

10.3 Kisi-Kisi dan Contoh Naskah UTS

UTS dilaksanakan pada Minggu 8 dalam bentuk ujian tertulis berbasis kasus selama 100 menit. UTS mengukur Sub-CPMK1–3; Sub-CPMK4 diukur melalui laporan aktor-arena. Skor setiap soal dicatat menurut Sub-CPMK-nya.

Tabel 10.3 Kisi-kisi UTS

No.	Sub-CPMK	Indikator yang diukur	Level	Bentuk	Skor
1	Sub-CPMK1	Membedakan politik lokal dan nasional serta menjelaskan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah	C2	Uraian singkat	15
2	Sub-CPMK1	Mengidentifikasi aktor, arena, dan kewenangan dalam kasus	C3	Analisis kasus	18
3	Sub-CPMK2	Membandingkan dua pendekatan teori politik lokal	C4	Uraian	15
4	Sub-CPMK2	Memilih dan menjustifikasi pendekatan teori untuk kasus	C5	Analisis kasus	18
5	Sub-CPMK3	Menganalisis tipe koalisi dan konflik elite	C4	Analisis kasus	16
6	Sub-CPMK3	Menganalisis patronase, sumber daya kekuasaan, dan kaitannya dengan oligarki	C4	Analisis kasus	18
				Jumlah	100

Contoh naskah UTS — kasus Kabupaten Batu Putih (ilustrasi)

Kabupaten Batu Putih adalah daerah hasil pemekaran di Kawasan Timur Indonesia. Bupati petahana, mantan pejabat birokrasi yang telah berkarier sejak dekade 1990-an, kembali mencalonkan diri bersama pengusaha tambang galian sebagai wakil. Pasangan ini diusung empat partai yang bersepakat membagi kursi pimpinan komisi DPRD. Penantangannya, seorang aktivis lingkungan yang didukung dewan adat dan jaringan gereja serta masjid, diusung dua partai kecil. Menjelang pilkada, izin galian di dua kecamatan diperpanjang, bantuan alat pertanian dibagikan melalui kepala desa, dan beberapa camat dimutasi. Forum warga lintas agama melaporkan dugaan mobilisasi ASN kepada Bawaslu.

Kasus ini fiktif dan disusun untuk keperluan ujian.

Soal:

1. Jelaskan perbedaan politik lokal dan politik nasional berdasarkan dimensi kewenangan, arena, dan aktor, serta bedakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. (15)
2. Identifikasi minimal lima aktor dalam kasus beserta kategori dan kepentingannya. Tunjukkan arena formal dan informal yang tampak, dan tentukan urusan pemerintahan mana yang menjadi kewenangan kabupaten. (18)
3. Bandingkan pendekatan elitisme/oligarki dan pluralisme dari segi asumsi, unit analisis, dan keterbatasannya. (15)
4. Pendekatan teori mana yang paling tepat menjelaskan kasus Batu Putih? Berikan justifikasi berdasarkan fakta kasus. (18)
5. Analisis apakah koalisi pendukung petahana cenderung programatik atau transaksional, serta identifikasi potensi konflik elite yang dapat muncul. (16)
6. Analisis praktik patronase dan sumber daya kekuasaan yang digunakan petahana, lalu kaitkan dengan argumen reorganisasi kekuasaan oligarki pasca-Orde Baru. (18)

Tabel 10.4 Pedoman penskoran UTS

No.	Unsur jawaban yang diharapkan
1	Tiga dimensi dijelaskan dengan contoh (8); tiga asas dibedakan dengan tepat sesuai UU 23/2014 (7).
2	Lima aktor tepat kategori dan kepentingannya (10); arena formal dan informal (4); analisis kewenangan (4).
3	Asumsi dan unit analisis (8); keterbatasan masing-masing (7).
4	Pilihan teori jelas (6); justifikasi berbasis minimal tiga fakta kasus (12).
5	Tipe koalisi dengan bukti (9); potensi konflik dan akarnya (7).
6	Bentuk patronase dan sumber daya (10); kaitan dengan argumen oligarki (8).

10.4 Kisi-Kisi dan Contoh Naskah UAS

UAS dilaksanakan pada Minggu 16 dalam bentuk ujian tertulis berbasis kasus selama 100 menit dan mengukur Sub-CPMK5–7. Sub-CPMK8 diukur melalui presentasi final dan jurnal refleksi.

Tabel 10.5 Kisi-kisi UAS

No.	Sub-CPMK	Indikator yang diukur	Level	Bentuk	Skor
1	Sub-CPMK5	Merumuskan problem statement berbasis data kasus	C6	Analisis data	20
2	Sub-CPMK5	Menilai kredibilitas data dan kesesuaian kewenangan daerah	C5	Uraian	19
3	Sub-CPMK6	Memetakan pemangku kepentingan dan strategi pelibatannya	C4	Analisis kasus	20
4	Sub-CPMK6	Merancang pesan advokasi untuk dua audiens dan menentukan pintu masuk kebijakan	C6	Perancangan	19
5	Sub-CPMK7	Menyusun rekomendasi operasional dan pernyataan nilai etis	C6	Perancangan	22
				Jumlah	100

Contoh naskah UAS — layanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Tanjung Karang (ilustrasi)

Data dinas kesehatan Kabupaten Tanjung Karang menunjukkan bahwa persentase persalinan di fasilitas kesehatan di tiga kecamatan kepulauan jauh lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten, sementara kasus kematian ibu dalam tiga tahun terakhir sebagian besar berasal dari kecamatan tersebut. Anggaran operasional puskesmas pembantu di kepulauan tidak meningkat selama tiga tahun. Kanal pengaduan daerah mencatat keluhan tentang ketiadaan bidan menetap. Bupati sedang menyiapkan RKPD tahun depan; anggota DPRD dari daerah pemilihan kepulauan berasal dari partai oposisi; organisasi perempuan dan tokoh agama setempat aktif mendampingi ibu hamil.

Kasus dan data ini fiktif dan disusun untuk keperluan ujian.

Soal:

1. Rumuskan problem statement advokasi untuk kasus tersebut dengan komponen isu, bukti, aktor terdampak, urgensi, dan lembaga berwenang. (20)
2. Nilai kredibilitas data yang tersedia, sebutkan data tambahan yang diperlukan beserta sumbernya, dan jelaskan kewenangan pemerintah kabupaten atas isu ini menurut UU 23/2014. (19)
3. Susun peta pemangku kepentingan (minimal enam aktor) pada matriks pengaruh-kepentingan dan tentukan strategi pelibatannya. (20)
4. Rancang pesan kunci untuk DPRD dan untuk warga, serta tentukan pintu masuk kebijakan yang paling strategis dalam siklus perencanaan dan penganggaran. (19)
5. Susun dua rekomendasi operasional (siapa, apa, kapan, sumber dana, indikator) dan satu paragraf pernyataan nilai etis yang memuat prinsip antikorupsi dan kebangsaan. (22)

Tabel 10.6 Pedoman penskoran UAS

No.	Unsur jawaban yang diharapkan
1	Kelima komponen lengkap dan tajam (15); bahasa ringkas dan persuasif (5).

No.	Unsur jawaban yang diharapkan
2	Penilaian kredibilitas dengan empat pertanyaan (7); data tambahan dan sumber tepat (6); analisis kewenangan (6).
3	Aktor relevan dengan posisi dan pengaruh (10); strategi pelibatan tepat (10).
4	Pesan mengikuti alur masalah-bukti-solusi-ajakan dan sesuai audiens (12); pintu masuk tepat (7).
5	Rekomendasi operasional lengkap (14); pernyataan nilai etis konkret (8).

10.5 Rubrik Penilaian Tugas

Rubrik untuk laporan aktor-arena, *policy brief*, presentasi final, dan jurnal refleksi disajikan pada Tabel 5.4, 8.4, 9.4, dan 9.5. Rubrik untuk komponen lainnya disajikan berikut ini.

Tabel 10.7 Rubrik peta aktor dan lembar kerja analisis (Unit 1 dan 3)

Kriteria	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
Kelengkapan identifikasi aktor	Minimal lima aktor lengkap dengan kategori, kepentingan, dan sumber daya	Lengkap dengan sedikit kekurangan	Kurang dari lima aktor atau informasi tidak lengkap	Aktor tidak teridentifikasi
Ketepatan penerapan konsep	Konsep aktor-arena, patronase, dan koalisi diterapkan tepat	Sebagian besar tepat	Sebagian keliru	Tidak menggunakan konsep
Kesesuaian data empiris	Data dapat ditelusuri dan dikutip dengan benar	Sebagian besar bersumber	Sumber terbatas	Tanpa sumber

Tabel 10.8 Rubrik esai analitis individual (Unit 2)

Kriteria	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
Ketepatan penerapan teori (40%)	Dua teori diterapkan tepat dan mendalam	Tepat, kurang mendalam	Sebagian keliru	Tidak menerapkan teori
Kedalaman analisis komparatif (30%)	Perbandingan tajam dan berargumen	Perbandingan memadai	Perbandingan dangkal	Tidak membandingkan
Penggunaan bukti empiris (20%)	Bukti relevan dan bersumber	Bukti cukup	Bukti minim	Tanpa bukti
Sistematika penulisan (10%)	Runtut dan baku	Runtut	Kurang runtut	Tidak sistematis

Tabel 10.9 Rubrik tes problem statement (Unit 5)

Kriteria	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
Kelengkapan komponen	Isu, bukti, aktor terdampak, urgensi, dan kewenangan lengkap	Satu komponen kurang tajam	Dua komponen kurang	Sebagian besar komponen tidak ada
Keakuratan penggunaan data	Data kasus dipakai akurat dan relevan	Akurat dengan sedikit kekeliruan	Kurang akurat	Tidak menggunakan data
Kesesuaian dengan kewenangan daerah	Lembaga berwenang tepat dan dijelaskan	Tepat tanpa penjelasan	Kurang tepat	Keliru

Tabel 10.10 Rubrik simulasi presentasi advokasi (Unit 6)

Kriteria	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
Kejelasan problem statement	Tajam dan meyakinkan	Jelas	Kurang jelas	Tidak jelas
Kualitas strategi advokasi	Komponen lengkap, realistis, dan kontekstual	Lengkap dan realistis	Sebagian komponen kurang	Tidak terstruktur
Argumen berbasis data	Mempertahankan argumen dengan data secara meyakinkan	Memadai	Sebagian tanpa data	Tidak berbasis data
Adaptasi pesan kepada audiens	Pesan disesuaikan dengan setiap peran panel	Cukup disesuaikan	Pesan seragam	Tidak sesuai audiens

Tabel 10.11 Rubrik partisipasi dan diskusi kasus (seluruh unit)

Kriteria	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
Keaktifan	Aktif dan relevan sepanjang diskusi	Cukup aktif	Jarang	Pasif
Kualitas kontribusi	Gagasan bernas dan menambah wawasan	Gagasan baik	Gagasan umum	Tidak berbobot
Menghargai pendapat	Menyimak dan menanggapi dengan santun	Menghargai	Kadang memotong	Mendominasi atau abai
Tanggung jawab dan etika	Selalu siap, jujur, dan kolaboratif	Umumnya siap	Sering terlambat	Lalai

10.6 Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Pada akhir semester, dosen pengampu menganalisis rekap ketercapaian Sub-CPMK, CPMK, dan CPL, hasil umpan balik mahasiswa terhadap modul (Lampiran 6), serta catatan pelaksanaan pembelajaran. Sub-CPMK dengan ketercapaian di bawah ambang program studi menjadi prioritas perbaikan, baik pada materi, aktivitas, maupun instrumen asesmen. Hasil analisis dilaporkan kepada koordinator rumpun mata kuliah dan program studi sebagai bahan peninjauan RPS dan revisi modul.

GLOSARIUM

Istilah	Pengertian
Advokasi kebijakan	Upaya terencana untuk memengaruhi pembuat keputusan agar menetapkan, mengubah, atau melaksanakan kebijakan demi kepentingan publik.
Aktor	Individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dan sumber daya untuk memengaruhi keputusan publik.
Arena	Ruang formal atau informal tempat aktor berinteraksi, bernegosiasi, dan berkonflik.
Broker	Perantara yang menghubungkan patron dengan klien dalam jaringan klientelisme.
CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan; kemampuan yang dimiliki setiap lulusan program studi.
CPMK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah; jabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah.
Dekonsentrasi	Pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan instansi vertikal.
Desentralisasi	Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Elitisme	Pendekatan yang memandang kekuasaan terkonsentrasi pada minoritas elite yang terorganisasi.
Klientelisme	Pola pertukaran dukungan politik dengan keuntungan material melalui jaringan patron, broker, dan klien.
Koalisi programatik	Koalisi yang dibangun atas kesamaan visi, program, atau ideologi.
Koalisi transaksional	Koalisi yang dibangun atas pembagian jabatan, proyek, atau dana.
Modal sosial	Kepercayaan, norma timbal balik, dan jaringan keterlibatan warga yang memudahkan tindakan bersama.
Neo-institusionalisme	Pendekatan yang menekankan peran aturan main formal dan informal dalam membentuk perilaku aktor.
Oligarki	Penguasaan kekuasaan politik dan ekonomi oleh aliansi elite yang menguasai sumber daya besar.
Otonomi daerah	Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI.
Patronase	Pembagian sumber daya kepada pendukung sebagai imbalan atas dukungan politik.
Patron-klien	Relasi pertukaran personal dan timbal balik antara pihak yang tidak setara.
Pluralisme	Pendekatan yang memandang kekuasaan tersebar di antara banyak kelompok yang bersaing.
Policy brief	Dokumen ringkas berisi masalah, bukti, dan rekomendasi kebijakan untuk pembuat keputusan.

Istilah	Pengertian
Problem statement	Pernyataan ringkas tentang isu kebijakan, buktinya, aktor terdampak, urgensi, dan lembaga berwenang.
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Sub-CPMK	Kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran, dijabarkan dari CPMK.
Tugas pembantuan	Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah, atau dari provinsi kepada kabupaten/kota, untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.
Urusan konkuren	Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dan menjadi dasar otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka Utama

- Hadiz, V. R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford University Press.
- Mahfud MD, M. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mietzner, M. (2013). *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. NUS Press.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. RoutledgeCurzon.
- Turner, M., & Hulme, D. (1997). *Governance, Administration and Development: Making the State Work*. Macmillan.

Pustaka Pendukung

- Azis, I. J., & Widodo, T. (2010). Decentralization, governance, and economic performance in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 11(1).
- Hikam, M. A. S. (1999). *Demokrasi dan Civil Society*. LP3ES.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Kajian Sistem Integritas Pemerintah Daerah*. KPK RI.

Bacaan Pengayaan

- Gibbs, G. (1988). *Learning by Doing: A Guide to Teaching and Learning Methods*. Further Education Unit, Oxford Polytechnic.
- March, J. G., & Olsen, J. P. (1989). *Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics*. Free Press.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- Scott, J. C. (1972). Patron-client politics and political change in Southeast Asia. *American Political Science Review*, 66(1), 91–113.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

LAMPIRAN 1

Templat Lembar Kerja Peta Aktor

Nama kelompok	
Kabupaten/kota kajian	
Isu atau arena yang dianalisis	

No.	Aktor	Kategori	Kepentingan	Sumber daya	Posisi	Relasi utama	Sumber data
1							
2							
3							
4							
5							
6							

Narasi analisis (maksimal 500 kata): jelaskan pola relasi kekuasaan, patronase, koalisi, atau konflik yang paling menonjol.

LAMPIRAN 2

Templat Problem Statement Advokasi

Judul isu	
Isu (masalah kebijakan)	
Bukti empiris dan sumbernya	
Aktor terdampak	
Urgensi intervensi	
Lembaga berwenang dan dasar kewenangan	
Pernyataan ringkas (maksimal 3 kalimat)	
Catatan revisi	

LAMPIRAN 3

Kanvas Strategi Advokasi

Tujuan advokasi (SMART)	
Target primer	
Target sekunder	
Tokoh pendukung kunci	
Penentang potensial	
Pesan kunci untuk DPRD	
Pesan kunci untuk eksekutif daerah	
Pesan kunci untuk masyarakat	
Saluran komunikasi	
Pintu masuk kebijakan	
Risiko dan mitigasi	

Tahapan aksi	Penanggung jawab	Waktu	Indikator keberhasilan

Tahapan aksi	Penanggung jawab	Waktu	Indikator keberhasilan

LAMPIRAN 4

Templat Policy Brief

Judul	
Ringkasan eksekutif (± 150 kata)	
Rumusan masalah	
Analisis bukti (tabel/grafik dan sumber)	
Opsi kebijakan dan penilaiannya	
Rekomendasi operasional (siapa, apa, kapan, sumber dana, indikator)	
Pernyataan nilai etis	
Referensi	

Lembar kontribusi anggota

Nama anggota	NIM	Peran	Bagian yang dikerjakan	Paraf

LAMPIRAN 5

Lembar Pernyataan Penggunaan GenAI dan Orisinalitas

Saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tugas berjudul merupakan hasil kerja saya/kami sendiri. Seluruh sumber telah dikutip sesuai kaidah, dan data yang digunakan tidak dikarang atau dimanipulasi.

Alat GenAI yang digunakan	Tujuan penggunaan	Bagian tugas yang dibantu

☐ Saya/kami tidak menggunakan GenAI dalam tugas ini.

Gorontalo, ...

(.....)

NIM

LAMPIRAN 6

Kuesioner Umpan Balik Mahasiswa terhadap Modul

Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai: 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = setuju, 4 = sangat setuju.

No.	Pernyataan	1	2	3	4
1	Capaian pembelajaran setiap unit dinyatakan dengan jelas.				
2	Uraian materi mudah dipahami.				
3	Studi kasus relevan dengan konteks Sulawesi dan KTI.				
4	Aktivitas pembelajaran membantu saya mencapai Sub-CPMK.				
5	Latihan dan kunci jawaban membantu saya mengukur penguasaan.				
6	Rubrik penilaian jelas dan adil.				
7	Proyek semester membangun kemampuan analisis dan advokasi saya.				
8	Tampilan dan tata letak modul memudahkan belajar.				
9	Nilai ICHSA-N tercermin dalam kegiatan pembelajaran.				
10	Secara keseluruhan, modul ini bermanfaat bagi saya.				

Bagian modul yang paling membantu	
Bagian modul yang perlu diperbaiki	
Saran lain	